



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN REBANA DAN KAWASAN JAWA
BARAT BAGIAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi secara terarah, fokus, terukur, dan tepat sasaran;
 - b. bahwa percepatan pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN REBANA DAN KAWASAN JAWA
BARAT BAGIAN SELATAN.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam rangka penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di:

- a. Kawasan Rebana; dan
- b. Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Pasal 2

- (1) Percepatan pembangunan Kawasan Rebana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a meliputi:
 - a. Kabupaten Subang;
 - b. Kabupaten Sumedang;
 - c. Kabupaten Indramayu;
 - d. Kabupaten Majalengka;
 - e. Kabupaten Cirebon;
 - f. Kota Cirebon; dan
 - g. Kabupaten Kuningan.
- (2) Percepatan pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b meliputi:
 - a. Kabupaten Sukabumi;
 - b. Kabupaten Cianjur;
 - c. Kabupaten Garut;
 - d. Kabupaten Tasikmalaya;
 - e. Kabupaten Ciamis; dan
 - f. Kabupaten Pangandaran.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan, yang selanjutnya disebut Rencana Induk.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi menteri dan kepala lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan sesuai kewenangan, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan
- b. pedoman bagi gubernur dan bupati/wali kota untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Pasal 5

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Proyek Strategis Nasional berlaku bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain maupun pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. kerja sama pemerintah dengan badan usaha; dan/atau
- d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan atas tata kelola percepatan pelaksanaan Rencana Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, melaksanakan:

- a. pendampingan atas ketersediaan dokumen perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan proyek dan program dalam Rencana Induk; dan
- b. penyelesaian hambatan dan pengawasan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11

- (1) Perubahan proyek dan program dalam Rencana Induk, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peraturan Presiden ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Proyek Strategis Nasional.
- (2) Perubahan proyek dan program dalam Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyesuaikan dokumen perencanaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden ini.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 215

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Bhakti Parikesit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KAWASAN REBANA DAN
KAWASAN JAWA BARAT BAGIAN SELATAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

I.1.1 Kondisi Sosial Ekonomi

A. Kependudukan

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah populasi penduduk tertinggi di Indonesia yang mencapai 48.274.162 jiwa atau ekuivalen dengan 17,86% dari jumlah penduduk Indonesia dengan *sex ratio* sebesar 103,10 di tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari 1,30% pada tahun 2019 menjadi 1,11% pada tahun 2020.

**Tabel I.1 Indikator Kependudukan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	47.379.389	48.037.827	48.683.861	49.316.712	48.274.162
1.a	- Laki-Laki	Jiwa	24.011.261	24.355.331	24.652.609	24.962.701	24.508.885
1.b	- Perempuan	Jiwa	23.368.128	23.702.496	24.031.252	24.354.011	23.765.277
2.	LPP	%	1,43	1,39	1,34	1,30	1,11
3.	Kepadatan Penduduk	Jiwa/ km ²	1.339	1.358	1.376	1.358	1.365

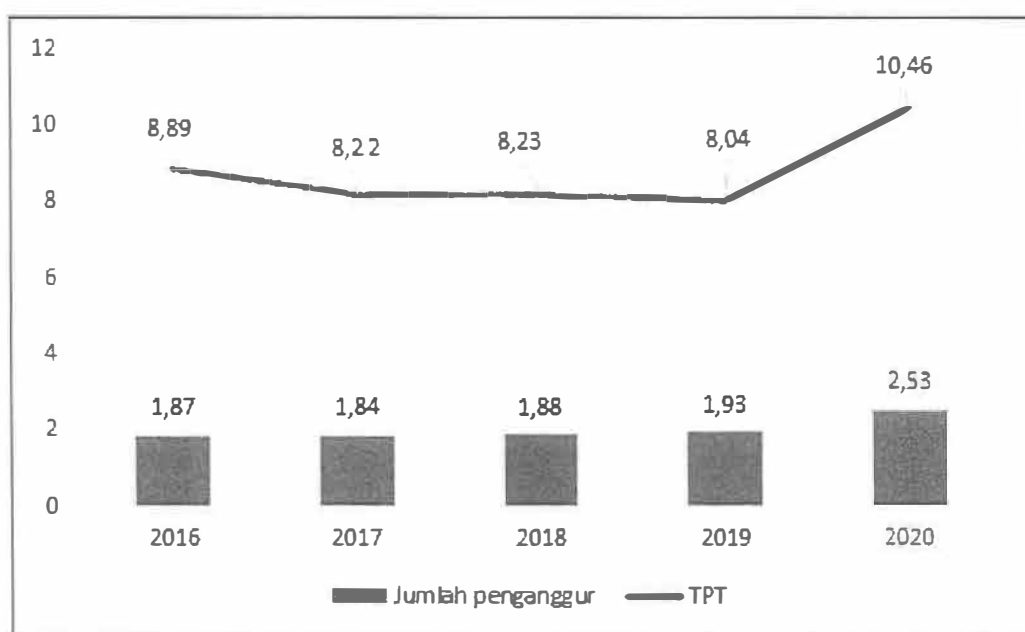


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

B. Ketenagakerjaan

Selama periode tahun 2016-2019, kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat turun sebesar 0,85%. Namun pada tahun 2020, TPT Provinsi Jawa Barat naik menjadi 10,46%. Jumlah pengangguran pada tahun 2020 adalah sebesar 2,53 juta, dengan adanya peningkatan sebesar 1,57% dibanding tahun 2016.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar I.1 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

Dilihat dari Upah Minimum Provinsi (UMP), Provinsi Jawa Barat termasuk 4 (empat) provinsi terendah di Indonesia. Pada tahun 2020 UMP Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.810.350 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp1.668.372. Sementara itu pada tahun 2020, penduduk di Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 18,79 juta jiwa atau sebesar 70,68% dari keseluruhan penduduk di Provinsi Jawa Barat.

C. Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 secara nominal menurun sebesar Rp36 triliun dibandingkan tahun 2019, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) menurun menjadi Rp36,34 triliun pada periode yang sama. Selama 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha, yaitu Industri

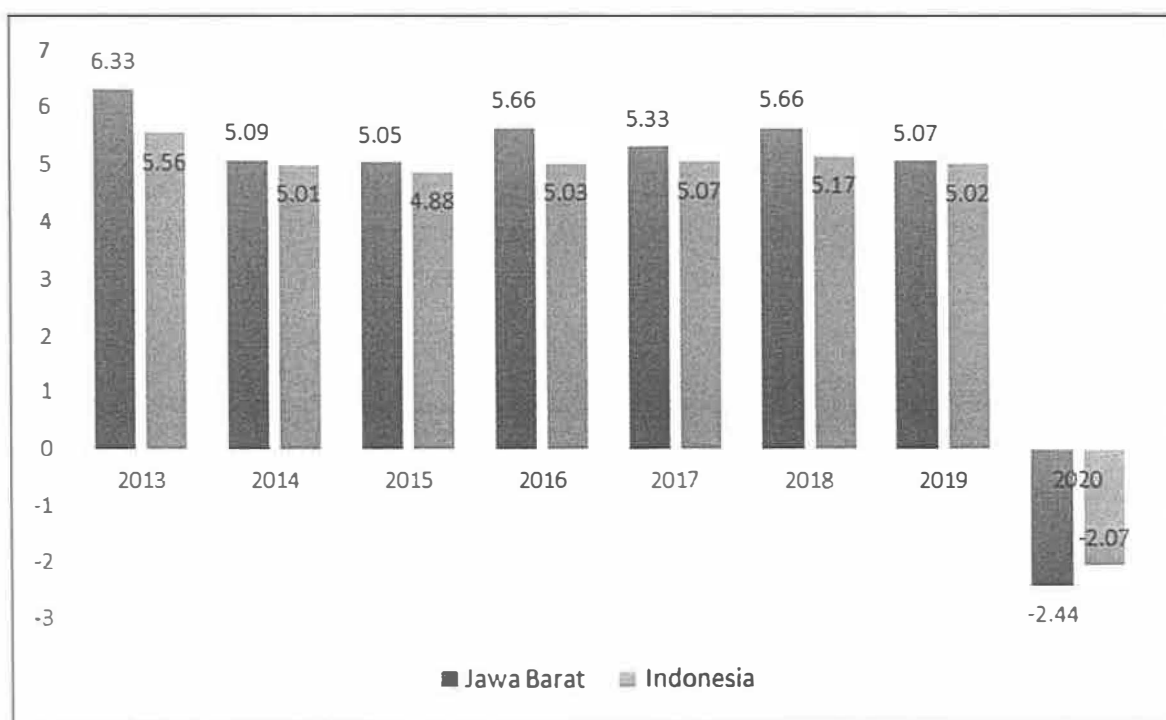


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; serta Transportasi dan Pergudangan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 5,07% dan menopang sebesar 13,52% dari perekonomian nasional. Namun, pada tahun 2020 LPE Provinsi Jawa Barat berkontraksi menjadi -2,44%.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar I.2 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional

D. Realisasi Investasi

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 14,6%. Provinsi Jawa Barat merupakan tujuan utama investasi di Indonesia. Realisasi PMA Provinsi Jawa Barat tertinggi secara nasional mencapai Rp69 triliun di tahun 2020, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp88,22 triliun. Namun realisasi investasi domestik PMDN Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan di tahun 2019, dari Rp49,25 triliun menjadi Rp51,4 triliun.



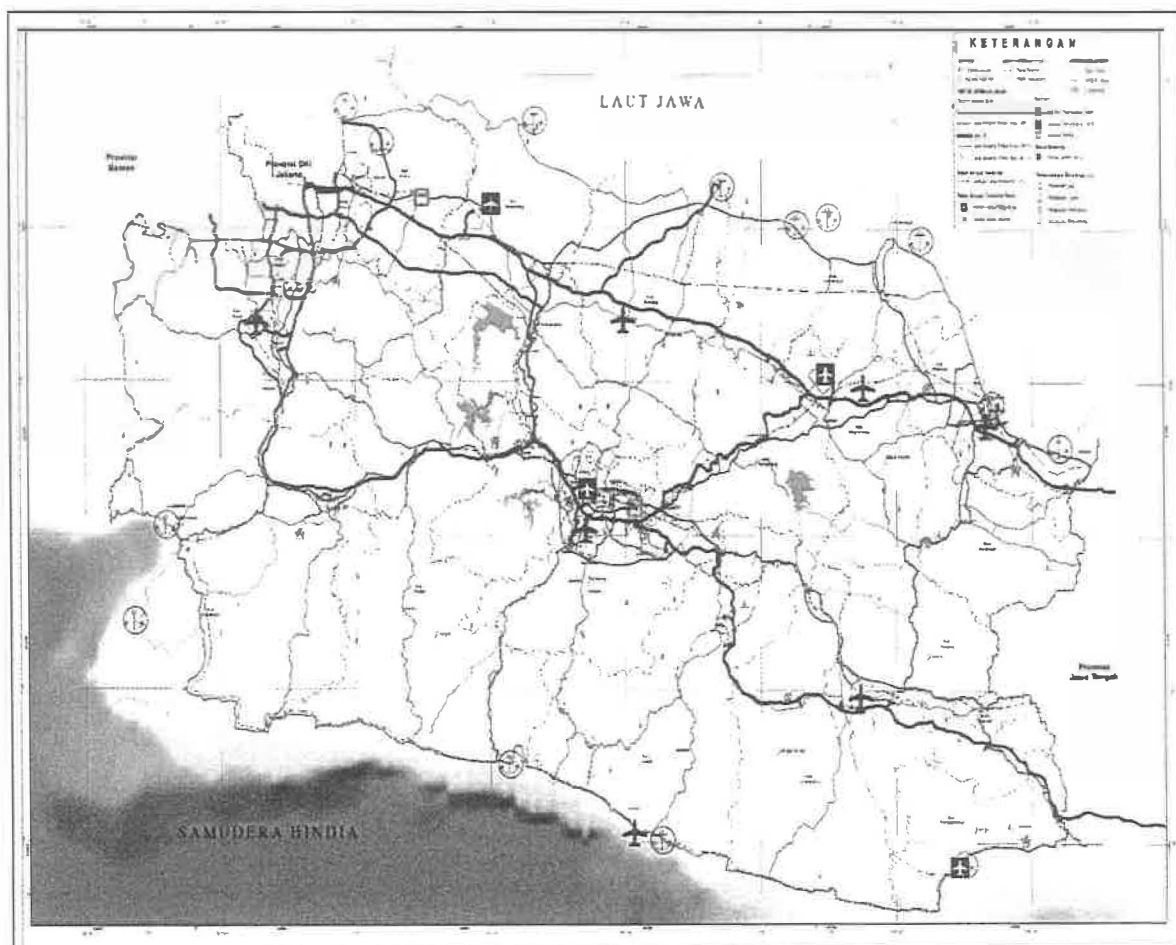
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada realisasi PMA dan PMDN tahun 2020 di antaranya sektor konstruksi sebesar 22,15%, sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi sebesar 16,99%, sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar 14,15%, sektor kelistrikan, gas, dan penyediaan air 10,44%, serta sektor transportasi dan kendaraan industri lainnya sebesar 9,74%.

I.1.2 Kondisi Konektivitas

Provinsi Jawa Barat memiliki konektivitas yang baik, baik antarkabupaten/kota di dalamnya maupun dengan wilayah lainnya dalam skala nasional maupun global. Konektivitas Provinsi Jawa Barat didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang terdiri dari jaringan jalan, bandar udara (bandara), pelabuhan, terminal, dan jaringan kereta api dengan kondisi yang memadai.



Gambar I.3 Peta Konektivitas Provinsi Jawa Barat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Secara umum saat ini Provinsi Jawa Barat memiliki 4 (empat) bandara, 6 (enam) pelabuhan, 9 (sembilan) ruas jalan tol, serta 7 (tujuh) jalur kereta api yang tersebar di berbagai wilayah. Berikut adalah rincian sarana dan prasarana pendukung konektivitas Provinsi Jawa Barat.

Tabel I.2 Prasarana Transportasi Skala Nasional/Internasional di Provinsi Jawa Barat

NO.	NAMA PRASARANA	LOKASI
Bandara		
1.	Bandara Husein Sastranegara	Kota Bandung
2.	Bandara International Kertajati	Kab. Majalengka
3.	Bandara Chakrabuwana Cirebon	Kota Cirebon
4.	Bandara Nusawiru	Kab. Pangandaran
Pelabuhan		
1.	Pelabuhan Palabuhanratu	Kab. Sukabumi
2.	Pelabuhan Pertiwi	Kab. Subang
3.	Pelabuhan Pangandaran	Kab. Pangandaran
4.	Pelabuhan Indramayu	Kab. Indramayu
5.	Pelabuhan Patimban	Kab. Subang
6.	Pelabuhan Cirebon	Kota Cirebon
Jalan Tol		
1.	Ruas Tol Bocimi	Bogor-Ciawi-Sukabumi
2.	Ruas Tol Cipularang	Cikampek-Purwakarta-Padalarang
3.	Ruas Tol Padaleunyi	Padalarang-Cileunyi
4.	Ruas Tol Cipali-Palikanci-Pejagan	Cikopo-Palimanan
5.	Ruas Tol Palikanci	Palimanan-Kanci
6.	Ruas Tol Cijagan	Kanci-Pejagan
7.	Ruas Tol Soroja	Soreang-Pasirkoja
8.	Ruas Tol Cisumdawu	Cileunyi-Sumedang-Dawuan
9.	Ruas Tol Japek 2 Selatan	Jakarta-Cikampek

Tabel I.3 Stasiun Kereta Api di Provinsi Jawa Barat

No.	Daerah Operasional	Jalur	Jumlah Stasiun
1.	Daop 1 Jakarta (Wilayah Jawa Barat)	Jatinegara-Cirebon	12
		Manggarai-Sukabumi	20
2.	Daop 2 Bandung	Cikampek-Padalarang	44
		Padalarang-Sukabumi	17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

No.	Daerah Operasional	Jalur	Jumlah Stasiun
3.	Daop 3 Cirebon	Cikampek-Cirebon	19
		Cirebon-Tegal	10
		Cirebon-Prupuk	10

Sarana dan prasarana konektivitas Provinsi Jawa Barat yang baik ini merupakan sebuah potensi bagi Provinsi Jawa Barat dalam upaya pengembangan wilayah. Konektivitas baik darat, laut, maupun udara ini mampu mendukung kegiatan dasar masyarakat yang tinggal di dalamnya dan upaya pengembangan kegiatan sektoral lainnya.

I.1.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

A. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk kerja sama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. Tujuan MEA 2015 yang paling utama adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. ASEAN diharapkan akan menjadi sebuah wilayah yang stabil, sejahtera, dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, kemiskinan yang berkurang, dan sosio-ekonomi yang beragam. Terdapat 5 (lima) pilar dalam cetak biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari Pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat memproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen. Sebab di sisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha. Provinsi Jawa Barat telah siap untuk menghadapi pasar tunggal MEA. Untuk itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan beberapa langkah dan antisipasi, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), maupun kualitas barang dan jasa, termasuk perizinan usaha di Provinsi Jawa Barat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

B. Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan di Provinsi Jawa Barat ditandai dengan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Degradasi kuantitas air yang terjadi di Provinsi Jawa Barat di antaranya diakibatkan oleh pemanfaatan air tanah secara berlebihan, berkurangnya luas kawasan resapan air (*catchment area*), dan berkurangnya fungsi sungai sebagai sumber daya air akibat pencemaran dan sedimentasi. Degradasi kualitas air ditandai dengan banyaknya sungai di Provinsi Jawa Barat yang tercemar berat, salah satunya adalah Sungai Citarum, akibat belum terkendalinya pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, dan pertambangan. Penurunan kualitas udara ambien di Provinsi Jawa Barat diakibatkan oleh meningkatnya emisi kendaraan bermotor, emisi cerobong industri, dan emisi pembakaran sampah oleh masyarakat.

Peningkatan emisi gas rumah kaca diakibatkan oleh meningkatnya alih fungsi lahan, aktivitas pertanian dan peternakan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan energi fosil berlebihan, dan limbah domestik yang tidak terkelola. Dari hasil proyeksi hingga tahun 2030, besar emisi gas rumah kaca di Provinsi Jawa Barat pada kondisi tanpa aksi mitigasi (*business as usual*) mencapai 135.212.417 ton eCO₂. Sumber emisi terbesar Provinsi Jawa Barat adalah sektor energi sebesar 41%, menyusul sektor lainnya, yaitu sektor transportasi sebesar 31%, sektor kehutanan sebesar 12%, sektor limbah domestik sebesar 11%, dan sektor pertanian sebesar 5%.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 adalah 61,59 poin atau cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,84 poin dengan sumber pencemar adalah limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan;
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,58 poin dengan sumber pencemar adalah emisi cerobong industri, emisi gas buang kendaraan bermotor, *open burning* sampah, dan kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH);
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 42,28 poin dengan komponen tutupan lahan adalah hutan lahan kering, hutan mangrove, hutan tanaman, semak belukar, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, tubuh air, lahan terbuka, pertambangan, dan permukiman/lahan terbangun;
4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 74,17 poin dengan sumber pencemar adalah limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

C. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

D. Disparitas Pembangunan

Disparitas yang terjadi di Provinsi Jawa Barat menjadi jurang pemisah (*gap*) dan kesenjangan spasial antara wilayah maju (*developed region*) dan wilayah tertinggal (*underdeveloped region*). Angka kesenjangan (*gini ratio*) mewarnai proses pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang sedang berlangsung dan adanya indikasi bahwa pembangunan di Provinsi Jawa Barat belum merata, dimana angka kesenjangan (*gini ratio*) Provinsi Jawa Barat mencapai 0,403% dan selalu berada di atas angka nasional 0,381%. Provinsi Jawa Barat juga mempunyai wilayah geografis yang berbeda antara barat, timur, utara dan selatan. Dengan berbagai karakteristik yang berbeda menyebabkan adanya tingkat kesenjangan terutama kesenjangan/disparitas pembangunan.

Terjadi disparitas pembangunan antara kawasan di Provinsi Jawa Barat yang terletak di sekitar Provinsi DKI Jakarta dengan kawasan Provinsi Jawa Barat lainnya, terutama bagian selatan. Hal itu disebabkan percepatan pembangunan alami yang terjadi sebagai dampak dari pembangunan DKI Jakarta. Pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dilakukan untuk mengurangi tingkat disparitas antarwilayah di seluruh Provinsi Jawa Barat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

BAB II KAWASAN PRIORITAS

Kawasan Prioritas adalah kawasan yang mendapat prioritas paling utama di dalam pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan. Kawasan prioritas yang dimaksud dalam Peraturan Presiden ini adalah Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

II.1 KAWASAN REBANA

Kawasan Rebana meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.

II.1.1 Kondisi Sosial Ekonomi

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berikut adalah data luas wilayah, jumlah, dan kepadatan penduduk di Kawasan Rebana.

**Tabel II.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Kawasan Rebana Tahun 2020**

No.	Wilayah	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1.	Kab. Subang	1.893,95	1.595.320	842
2.	Kab. Sumedang	1.518,33	1.152.510	759
3.	Kab. Indramayu	2.040,11	1.834.430	899
4.	Kab. Majalengka	1.204,24	1.305.480	1.084
5.	Kab. Cirebon	984,52	2.270.620	2.306
6.	Kota Cirebon	37,36	333.300	8.921
7.	Kab. Kuningan	1.110,56	1.167.690	1.051

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

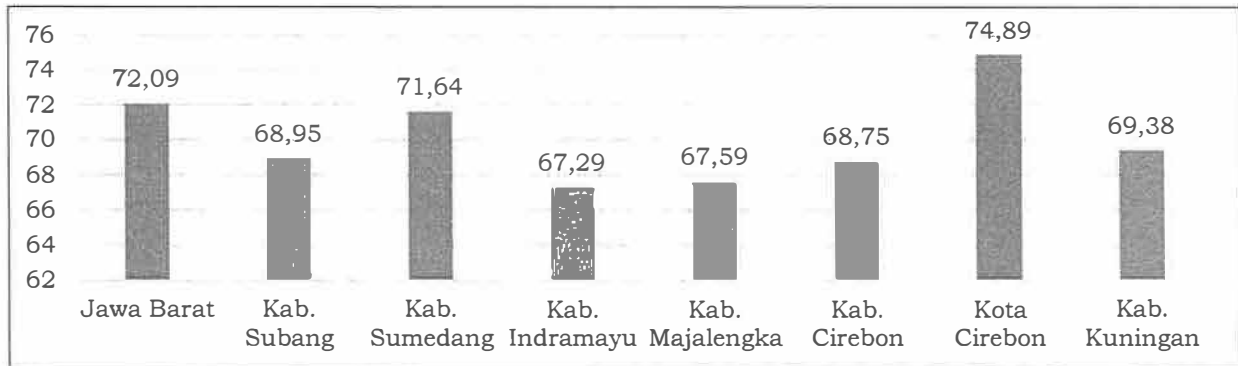
B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berikut merupakan perbandingan IPM di Kawasan Rebana yang terdiri dari Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan dengan IPM Provinsi Jawa Barat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11-



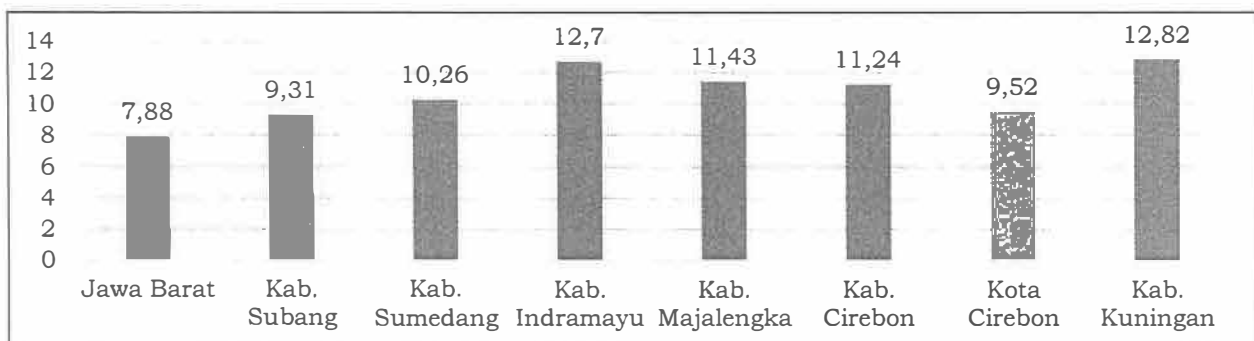
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar II.1 Perbandingan IPM Kawasan Rebana dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Kota Cirebon memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Barat yaitu 74,89 poin, sementara itu 6 (enam) kabupaten lain di Kawasan Rebana memiliki nilai IPM lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Barat, dengan IPM terendah sebesar 67,29 poin di Kabupaten Indramayu.

C. Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mencapai 3.920.230 jiwa dengan persentase 7,88%. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3.399.160 jiwa dengan persentase 6,91%. Berikut adalah perbandingan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar II.2 Perbandingan Kemiskinan Kawasan Rebana dengan Provinsi Jawa Barat (%) Tahun 2020

Tingkat kemiskinan 7 (tujuh) kabupaten/kota di Kawasan Rebana berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Kuningan dengan nilai 12,82%, sedangkan tingkat kemiskinan terendah adalah Kabupaten Subang dengan nilai 9,31%.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

D. Produk Domestik Regional Bruto

Berikut adalah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) kabupaten/kota di Kawasan Rebana.

**Tabel II.2 PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Kawasan Rebana (Miliar Rupiah)
2016-2020**

No.	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Subang	24.976,92	26.250,72	27.408,20	28.616,82	28.252,05
2.	Kab. Sumedang	20.092,72	21.276,70	22.507,96	23.932,73	23.665,01
3.	Kab. Indramayu	56.706,18	57.515,01	58.287,98	60.153,18	59.200,00
4.	Kab. Majalengka	17.591,79	18.789,49	20.006,88	21.550,25	21.736,60
5.	Kab. Cirebon	29.149,31	30.623,31	32.161,84	33.668,10	33.304,49
6.	Kota Cirebon	14.077,05	14.893,14	15.817,18	16.811,69	16.645,13
7.	Kab. Kuningan	13.977,77	14.866,62	15.821,96	16.864,15	16.879,45
Total PDRB ADHK Kawasan Rebana		176.571,74	184.234,99	192.012,00	201.590,92	199.682,73
Provinsi Jawa Barat		1.277.312,17	1.349.822,50	1.429.171,09	1.504.776,35	1.472.826,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Jika dibandingkan dengan PDRB ADHK Provinsi Jawa Barat, PDRB total kabupaten/kota di Kawasan Rebana menyumbang 13,6% dari total PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020.

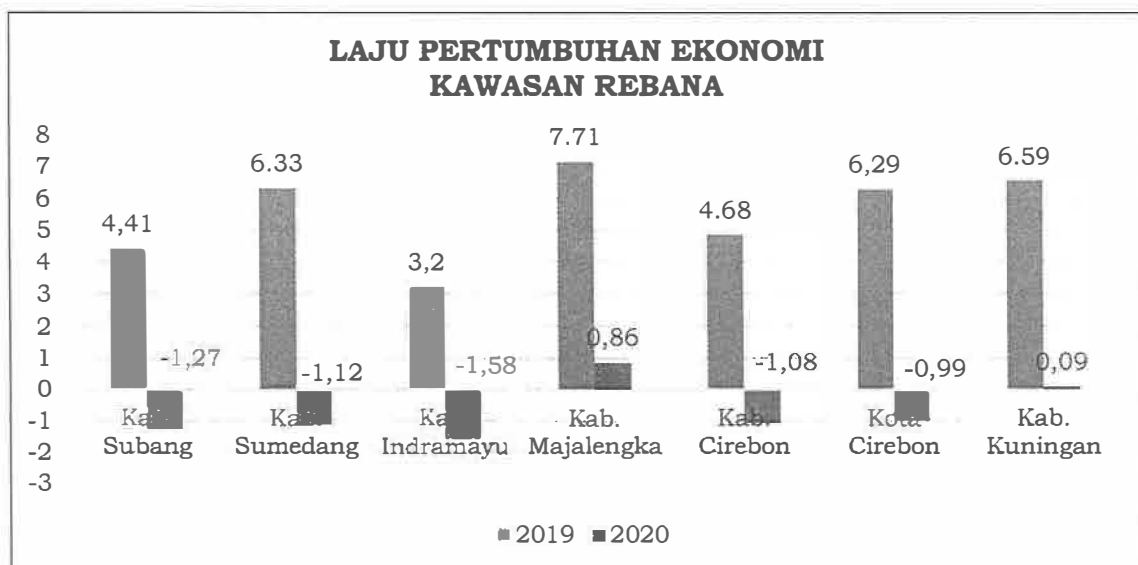
E. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di kabupaten/kota yang termasuk di Kawasan Rebana cenderung fluktuatif dan seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan LPE yang cukup besar pada tahun 2020 dengan rata-rata LPE di kawasan tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar -0,72. Sementara di tahun 2019 rata-rata LPE di kawasan tersebut adalah 5,60%. Jumlah ini berada di atas rata-rata LPE Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan sebesar 5,07%. Hal tersebut merupakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13-



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

**Gambar II.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Rebana
Tahun 2019 – 2020**

II.1.2 Kondisi Konektivitas

Berikut ini adalah gambaran umum Kawasan Rebana berdasarkan kondisi konektivitas.

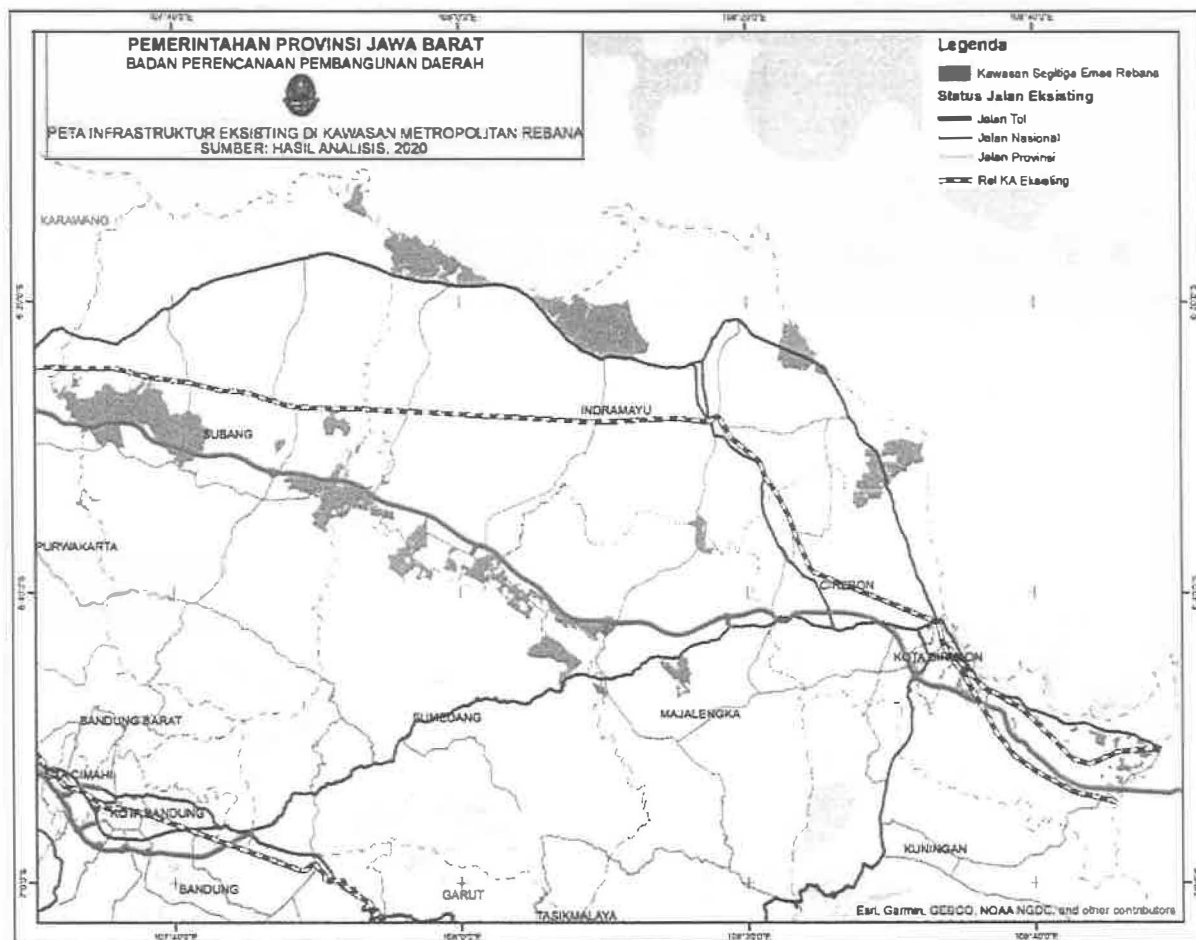
A. Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan di Kawasan Rebana meliputi jalan tol dan nontol. Jalan tol yang melintasi Kawasan Rebana yaitu Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Jalan Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) yang merupakan bagian dari Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jawa Bagian Barat hingga ke Jawa Bagian Timur. Jalan tol ini merupakan jalan utama yang berfungsi untuk menghubungkan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-14-



Gambar II.4 Peta Jaringan Jalan di Kawasan Rebana

Ruas Jalan Nasional yang ada di Kawasan Rebana, meliputi:

1. Ruas jalan batas Kab. Subang-batas Kota Pamanukan;
2. Ruas jalan batas Kota Pamanukan-Sewo;
3. Ruas jalan Sewo-Lohbener;
4. Ruas jalan Lohbener-batas Kabupaten Indramayu-Soekarno-Hatta (Indramayu)-Mulia Asri (Indramayu)-Lingkar Indramayu-Karangampel-Singakerta-batas Kota Cirebon;
5. Ruas jalan Langut-Lohbener-Jatibarang-Cadang Pinggan-batas Kota Palimanan;
6. Ruas jalan batas Kota Sumedang-Cijelag-Kadipaten-Prapatan-Jatiwangi-batas Kota Palimanan-Klangenan-Jamblang-batas Kota Cirebon; dan
7. Ruas jalan Pilangsari (Cirebon)-Brigjen Darsono (Cirebon)-Jendral A.Yani (Cirebon)-Kalijaga (Cirebon)-batas Kota Cirebon-Losari.

Ruas jalan provinsi yang berada di Kawasan Rebana, antara lain:

1. Ruas jalan batas Purwakarta-Subang-Kalijati-Sukamandi;
2. Ruas jalan Subang-Bantarwaru-Haurgeulis-Patrol;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

3. Ruas jalan Subang-Pagaden-Pamanukan;
4. Ruas jalan Bantarwaru-Cikamurang-Jangga;
5. Ruas jalan Jatitujuh-Kadipaten-Jatibarang-Pekandangan; dan
6. Ruas jalan Bantarsari-Ciledug-Waled.

B. Terminal

Terminal yang terdapat di Kawasan Rebana merupakan terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Terminal-terminal yang terdapat di Kawasan Rebana adalah:

1. Terminal Harjamukti (Tipe A) di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
2. Terminal Kalijaga (Tipe B) di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
3. Terminal Weru (Tipe B) di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
4. Terminal Ciledug (Tipe B) di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon;
5. Terminal Indramayu Kota (Tipe B) di Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
6. Terminal Jatibarang (Tipe C) di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
7. Terminal Patrol (Tipe C) di Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
8. Terminal Pamanukan (Tipe B) di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang;
9. Terminal Blanakan (Tipe C) di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
10. Terminal Ciakar (Tipe B) di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
11. Terminal Tanjungsari (Tipe B) di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
12. Terminal Wado (Tipe C) di Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang;
13. Terminal Kadipaten (Tipe B) di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
14. Terminal Cigasong (Tipe C) di Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka;
15. Terminal Bantarujeg (Tipe C) di Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka;
16. Terminal Rajagaluh (Tipe C) di Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka;
17. Terminal Cirendang (Tipe A) di Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
18. Terminal Kertawinangun (Tipe A) di Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan;
19. Terminal Ciawigebang (Tipe B) di Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

20. Terminal Luragung (Tipe C) di Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan; dan
21. Terminal Cilimus (Tipe C) di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan.

C. Jaringan Rel Kereta Api

Jaringan rel kereta api di Kawasan Rebana merupakan bagian dari sistem jaringan rel kereta api jalur utara yakni dari Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Cirebon.

D. Bandara

Bandara yang dikembangkan dalam Kawasan Rebana adalah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang juga termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). BIJB Kertajati yang terletak di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia berdasarkan luasannya setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. BIJB Kertajati yang dibangun di atas tanah seluas 1.800 Ha memiliki landasan pacu tunggal sepanjang 3.000 meter. Selain itu, BIJB Kertajati memiliki kapasitas hingga 29 juta penumpang dan dapat digunakan untuk pesawat tipe Boeing 777 atau Airbus A380 serta melayani keberangkatan haji dan kargo baik nasional maupun internasional.

E. Pelabuhan

Kawasan Rebana berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Terdapat 2 (dua) pelabuhan besar, seperti Pelabuhan Cirebon dan Pelabuhan Patimban yang menjadi gerbang baru bagi Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan ekspor dan impor. Selain itu terdapat beberapa pelabuhan perikanan di Kawasan Rebana.

1. Pelabuhan Laut

a. Pelabuhan Patimban

Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang direncanakan memiliki kapasitas total terminal peti kemas sebesar 7,5 juta (*twenty foot equivalent unit/TEUs*) dan sudah memiliki fasilitas terminal kendaraan yang mampu mendukung pengiriman produk otomotif sebanyak 600.000 *Completely Build Up* (CBU). Pelabuhan Patimban merupakan infrastruktur utama yang menunjang pembangunan Kawasan Rebana dan akan menjadi salah satu simpul transportasi yang mampu menunjang aksesibilitas Kawasan Rebana serta mendukung dalam pengembangan kawasan industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

- b. Pelabuhan Cirebon
Pelabuhan Cirebon terletak di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon yang merupakan pelabuhan regional untuk meningkatkan aksesibilitas Kawasan Rebana. Revitalisasi Pelabuhan Cirebon diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 629 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Cirebon Provinsi Jawa Barat.
2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang berada di Kawasan Rebana adalah:
 - a. PPP Eretan Wetan (Kelas C), terletak di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
 - b. PPP Bondet (Kelas C), terletak di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;
 - c. PPP Blanakan (Kelas C), terletak di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang
 - d. PPP Muara Ciasem (Kelas C), terletak di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang
 - e. PPI Karangsong (Kelas D), terletak di Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
 - f. PPI Dadap (Kelas D), terletak di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;
 - g. PPI Tegal Agung (Kelas D), terletak di Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu; dan
 - h. PPI Gebang Mekar (kelas D), terletak di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon.

II.1.3 Isu Kawasan Rebana

A. Pengembangan dan Penyediaan Infrastruktur

Pembangunan dan penyediaan infrastruktur kawasan dan pengembangan ekonomi makro kawasan memiliki keterhubungan timbal balik. Melalui *multiplier effect*, peningkatan kualitas dan persebaran infrastruktur kawasan, baik infrastruktur fisik (seperti jalan, jembatan, dan struktur fasilitas umum) maupun infrastruktur nonfisik (seperti kesejahteraan sosial dan kesehatan), akan meningkatkan daya saing ekonomi kawasan. Sedangkan kondisi daya saing ekonomi kawasan akan turut meningkatkan daya tarik investasi kawasan sehingga pembangunan dan penyediaan infrastruktur kawasan akan lebih lancar. Keeratan pengaruh ini mengakibatkan pentingnya pembangunan dan penyediaan infrastruktur di Kawasan Rebana yang ditargetkan menjadi kawasan berdaya saing tinggi, baik dalam tingkat nasional maupun internasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

B. Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi

Menimbang kebijakan pengembangan industri di Provinsi Jawa Barat, perkembangan industri diarahkan menuju bagian timur-utara Provinsi Jawa Barat, yaitu Kawasan Rebana. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana diharapkan dapat memicu peningkatan investasi di kawasan industri yang terdapat di Kawasan Rebana. Pembangunan industri di Kawasan Rebana harus dipastikan tetap berada pada delineasi Kawasan Peruntukan Industri yang telah ditetapkan. Dengan adanya Kawasan Rebana, arah investasi dan pengembangan industri akan terdistribusi ke bagian timur-utara Provinsi Jawa Barat.

C. Peningkatan Daya Saing Investasi Kawasan

LPE Provinsi Jawa Barat tahun 2020 mengalami kontraksi secara signifikan akibat dampak pandemi COVID-19. Salah satu lapangan usaha yang berkontraksi adalah industri pengolahan yang menjadi sektor utama ekonomi Provinsi Jawa Barat. Selain itu, LPE kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat juga mengalami ketimpangan. Kabupaten/kota dengan LPE terendah dan tertinggi di Provinsi Jawa Barat terdapat di Kawasan Rebana yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kawasan Rebana masih mengalami ketimpangan. Menimbang urgensi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya pemulihan ekonomi salah satunya dengan pembangunan Kawasan Rebana. Pengembangan Kawasan Rebana diharapkan dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon melalui pengembangan kawasan industri dan penciptaan lapangan kerja.

D. Pengembangan Sistem Vokasi, Kewirausahaan, dan SDM Inovatif

Isu strategis dalam pengembangan Kawasan Rebana yaitu terjadinya fenomena deindustrialisasi di Indonesia. Pengembangan industri di Kawasan Rebana akan mengadopsi kebijakan industri 4.0 yang berdampak pada revitalisasi industri manufaktur dan mempercepat implementasi program-program *Fourth Industrial Revolution* (4IR). Pencanaan Industri 4.0 ini akan memberikan potensi yang besar untuk melipatgandakan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan daya saing dan penetrasi pangsa pasar ekspor global. Meningkatnya ekspor dapat membuka kesempatan kerja yang berdampak pada peningkatan konsumsi domestik di Indonesia. Peluang ini dijadikan *engine of economic growth* di Provinsi Jawa Barat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

II.1.4 Keunggulan Komparatif Kawasan Rebana

A. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kompetitif

Kawasan Rebana memiliki UMK yang kompetitif dengan rata-rata UMK tahun 2021 yaitu Rp2.444.517. Rata-rata UMK ini lebih rendah daripada UMK di kawasan industri lainnya termasuk di kawasan industri pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri I Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah rincian UMK kabupaten/kota di dalam Kawasan Rebana tahun 2021.

Tabel II.3 UMK dalam Kawasan Rebana Tahun 2021

Kabupaten/Kota	UMK 2021
Kab. Subang	Rp3.064.218
Kab. Sumedang	Rp3.241.929
Kab. Indramayu	Rp2.373.073
Kab. Majalengka	Rp2.009.000
Kab. Cirebon	Rp2.269.556
Kota Cirebon	Rp2.271.201
Kab. Kuningan	Rp1.882.642
Rata-Rata Kawasan Rebana	Rp2.444.517

Selain itu, UMK kabupaten/kota di dalam Kawasan Rebana juga kompetitif jika dibandingkan dengan kabupaten/kota dalam kawasan industri Provinsi Jawa Tengah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan kawasan industri di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut.

Tabel II.4 UMK dalam Kawasan Industri Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	UMK 2021	Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	UMK 2021
Kab. Gresik	Rp4.297.030	Kab. Kendal	Rp2.335.735
Kab. Bangkalan	Rp1.954.705	Kab. Semarang	Rp2.302.797
Kab. Mojokerto	Rp4.279.787	Kota Salatiga	Rp2.101.457
Kab. Lamongan	Rp2.488.724	Kab. Demak	Rp2.511.526
Kota Surabaya	Rp4.300.479	Kab. Grobogan	Rp1.890.000
Kab. Sidoarjo	Rp4.293.581	Kab. Purworejo	Rp1.905.400
Kab. Tuban	Rp2.532.234	Kab. Magelang	Rp2.075.000
Kab. Jombang	Rp2.654.095	Kab. Temanggung	Rp1.885.000
Kab. Bojonegoro	Rp2.066.781	Kab. Wonosobo	Rp1.920.000
Kota Mojokerto	Rp2.481.302	Kab. Brebes	Rp1.866.722
		Kab. Tegal	Rp1.958.000
		Kab. Pemasang	Rp1.926.000
Rata-Rata Provinsi Jawa Timur	Rp3.134.871	Rata-Rata Provinsi Jawa Tengah	Rp2.056.469



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

B. Konektivitas Kawasan Tinggi

Kawasan Rebana dibangun dengan poros pertumbuhan berupa infrastruktur perhubungan, yaitu Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati. Ketiga infrastruktur ini memainkan peranan penting dalam pergerakan orang dan barang baik dalam konstelasi nasional maupun global. Pelabuhan Cirebon saat ini sedang dilakukan revitalisasi agar dapat melayani pengangkutan peti kemas untuk ekspor. Pelabuhan Patimban yang telah diresmikan pada Desember 2020 dengan kapasitas mencapai 7,5 juta TEU dan dicanangkan sebagai pelabuhan kargo utama untuk industri di Provinsi Jawa Barat menggantikan Pelabuhan Tanjung Priok. Selain ketiga infrastruktur utama tersebut, di Kawasan Rebana juga akan dikembangkan kereta barang, kereta semi cepat, jalan tol, dan jalan nontol yang menghubungkan infrastruktur utama dan kawasan industri yang akan dikembangkan. Dukungan infrastruktur yang tersedia menjadikan konektivitas Kawasan Rebana sangat baik, baik untuk kepentingan industri maupun kebutuhan pelayanan dasar. Ketersediaan infrastruktur di dalam kawasan ini juga merupakan nilai lebih Kawasan Rebana dibandingkan kawasan industri lain di Indonesia.

C. Sumber Daya Identik dan Melimpah

Kawasan Rebana memiliki potensi sumber daya yang identik dan melimpah, meliputi hasil pertambangan, bahan galian nonlogam, hasil hutan, pertanian, perkebunan, serta hasil laut, meliputi:

1. Hasil Pertambangan

Kawasan Rebana memiliki potensi hasil tambang berupa minyak dan gas terutama di pesisir pantai utara seperti Kabupaten Indramayu. Selain itu saat ini juga telah terdapat rencana pengembangan Kilang Minyak VI milik Pertamina yang mengolah minyak mentah dari Duri dan Minas dengan kapasitas produksi ditargetkan mencapai lebih dari 300.000 barel per hari. Sedangkan potensi gas terdapat di Kilang LPG Mundu VI dengan kapasitas 47,5 *Million Standard Cubic Feet per Day* (MMSCFD). Ketersediaan sumber daya hasil tambang menjamin keberlangsungan proses produksi industri kimia dan produk turunannya termasuk minyak dan gas di Kawasan Rebana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

2. Bahan Galian Nonlogam

Terdapat bahan galian nonlogam di dalam Kawasan Rebana meliputi andesit, batu gamping, batu lempung, batu kapur, tanah liat, dan tras terutama di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Ketersediaan sumber daya bahan galian nonlogam menjamin keberlangsungan proses produksi industri pengolahan bahan bangunan dan *hotmix*/beton di Kawasan Rebana.

3. Komoditas Hasil Hutan

Kawasan Rebana memiliki hutan produksi yang luas meliputi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan, KPH Majalengka, KPH Indramayu, KPH Sumedang, dan KPH Purwakarta. Komoditas utama yang dihasilkan berupa kayu putih, jati, mahoni, pinus, karet, dan rotan. Ketersediaan sumber daya hasil hutan menjamin keberlangsungan proses produksi industri kerajinan, furnitur, dan barang dari kayu lainnya di Kawasan Rebana.

4. Komoditas Hasil Pertanian dan Perkebunan

Terdapat potensi komoditas hasil pertanian terutama padi, jagung, ubi jalar, bawang merah, tomat, cabai, jamur, kacang panjang, dan mentimun. Selain itu juga terdapat komoditas hasil perkebunan yang identik di kawasan ini di antaranya mangga agrimania, mangga gedong gincu, pepaya california, nanas, jambu biji merah, sawo citali, ubi cilembu, nangka, kopi, teh, dan pisang. Ketersediaan sumber daya hasil pertanian menjamin keberlangsungan proses produksi industri pengolahan makanan dan minuman di Kawasan Rebana.

5. Komoditas Hasil Laut

Kawasan Rebana memiliki garis pantai yang panjang sehingga memiliki potensi komoditas perikanan yang melimpah baik dari hasil laut maupun budi daya di antaranya ikan, udang, bandeng, kerang hijau, dan rumput laut. Komoditas hasil laut di Kawasan Rebana berkontribusi lebih dari 40% produksi ikan di Provinsi Jawa Barat. Ketersediaan sumber daya hasil laut menjamin keberlangsungan proses produksi industri pengolahan perikanan dan pengolahan makanan di Kawasan Rebana.

Ditambah dengan konektivitas kawasan yang baik, ketersediaan sumber daya di dalam kawasan menjamin keberlangsungan proses produksi industri yang berlokasi di Kawasan Rebana.

D. Potensi Pengembangan Tenaga Kerja Tinggi

Menimbang jumlah angkatan kerja di dalam kawasan, potensi pengembangan tenaga kerja di Kawasan Rebana cukup tinggi. Potensi pengembangan ini juga didukung dengan adanya perguruan tinggi, sekolah vokasi, sekolah menengah kejuruan, dan *teaching factory school* yang saat ini



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

telah dan akan dikembangkan di setiap kabupaten/kota di dalam Kawasan Rebana untuk mendukung terciptanya *link and match* ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja industri. Program studi keahlian yang dikembangkan untuk mendukung spesialisasi pengembangan industri di dalam kawasan, di antaranya pertambangan, geologi, kimia industri, nautika perkapalan, agroindustri, agroteknologi, konstruksi bangunan, otomotif, mesin, komputer dan jaringan, kelistrikan, farmasi, dan tata busana. Ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri ini akan menciptakan *labor pool* dan menjadi salah satu manfaat aglomerasi yang akan diterima industri apabila berlokasi di Kawasan Rebana.

II.2 KAWASAN JAWA BARAT BAGIAN SELATAN

Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan meliputi 6 (enam) kabupaten, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.

II.2.1 Kondisi Sosial Ekonomi

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berikut adalah data luas wilayah, jumlah, dan kepadatan penduduk di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Tabel II.5 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2020

No.	Wilayah	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1.	Kab. Sukabumi	4.145,70	2.725.450	657
2.	Kab. Cianjur	3.840,16	2.477.560	645
3.	Kab. Garut	3.074,07	2.585.610	841
4.	Kab. Tasikmalaya	2.551,19	1.865.200	731
5.	Kab. Pangandaran	1.010,00	423.670	419
6.	Kab. Ciamis	1.414,71	1.229.070	869

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

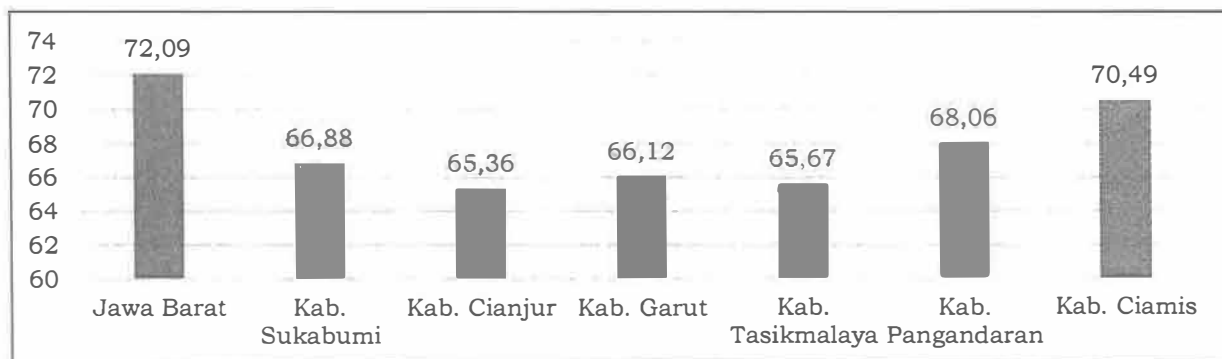
B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2020, IPM Provinsi Jawa Barat mencapai 72,09 poin, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 72,03 poin. Berikut adalah perbandingan IPM Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

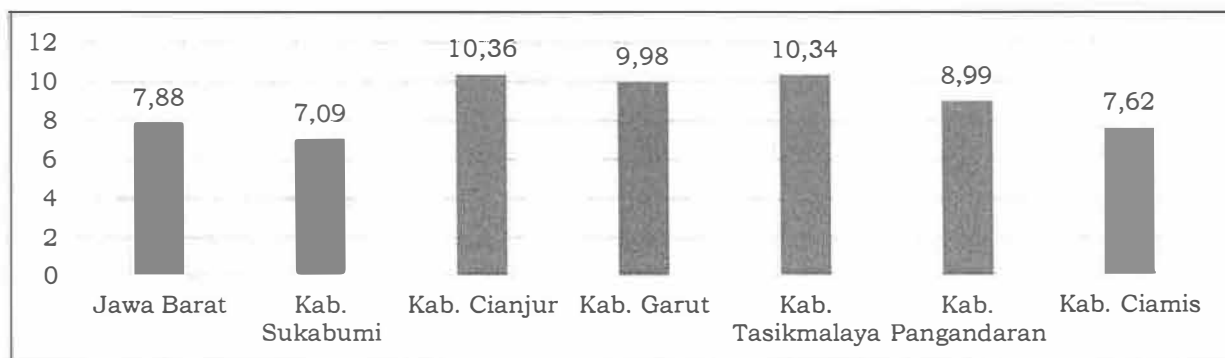


Gambar II.5 Perbandingan IPM Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Seluruh kabupaten yang berada pada Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan memiliki IPM di bawah Provinsi Jawa Barat. Di antara kabupaten lainnya Kabupaten Ciamis memiliki IPM paling tinggi yaitu mencapai 70,49 poin. IPM terendah yaitu Kabupaten Cianjur dengan nilai mencapai 65,36 poin.

C. Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mencapai 3.920.230 jiwa dengan persentase 7,88%. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 3.399.160 jiwa dengan persentase 6,91%. Berikut adalah perbandingan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.



Gambar II.6 Perbandingan Kemiskinan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dengan Provinsi Jawa Barat (%) Tahun 2020

Tingkat kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Tingkat kemiskinan 4 (empat)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cianjur merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi dengan nilai 10,36% dan tingkat kemiskinan terendah adalah Kabupaten Sukabumi dengan nilai 7,09%.

D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berikut adalah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) kabupaten/kota di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Tabel II.6 PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Miliar Rupiah) 2016-2020

Nö.	Kab / Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Sukabumi	39.447,01	41.716,23	44.140,89	46.703,62	46.199,30
2.	Kab. Cianjur	26.981,37	28.539,99	30.320,21	32.039,59	31.789,06
3.	Kab. Garut	33.803,54	35.464,91	37.225,15	39.092,49	38.598,15
4.	Kab. Tasikmalaya	20.824,80	22.063,29	23.320,61	24.586,67	24.346,36
5.	Kab. Ciamis	18.844,97	19.826,75	20.878,69	22.001,24	21.970,41
6.	Kab. Pangandaran	6.602,73	6.939,64	7.308,73	7.742,87	7.738,97
	Total PDRB ADHK Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan	146.504,42	154.550,81	163.194,28	172.166,48	170.642,25
	Provinsi Jawa Barat	1.277.312,17	1.349.822,50	1.429.171,09	1.504.776,35	1.472.826,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Jika dibandingkan dengan PDRB ADHK Provinsi Jawa Barat, PDRB total kabupaten/kota di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan menyumbang 11,58% dari total PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020.

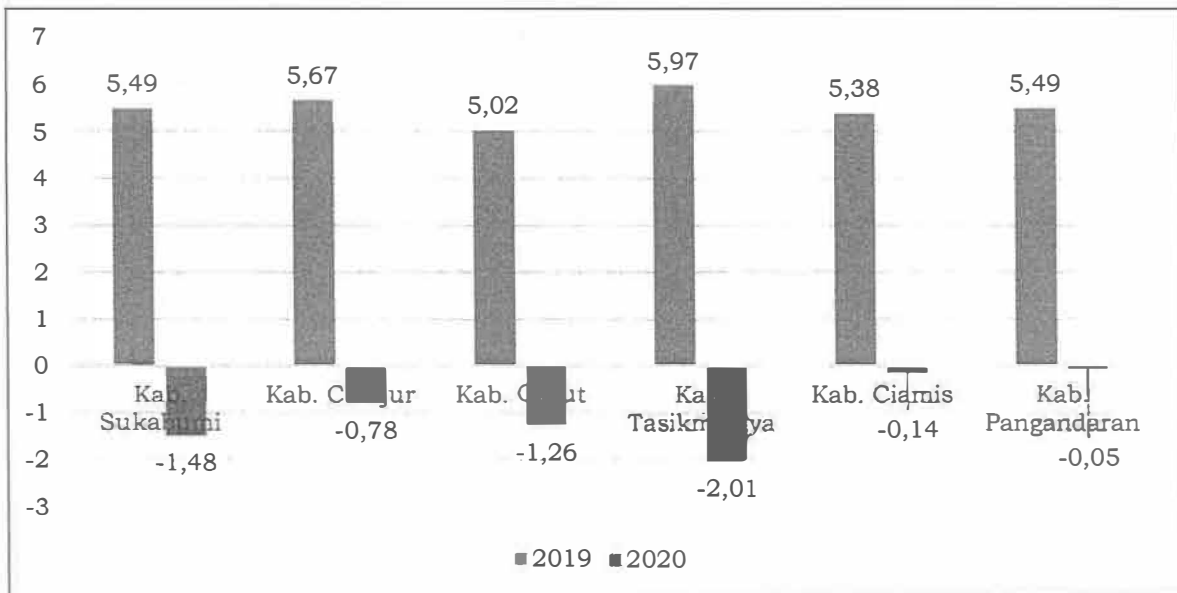
E. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

LPE di kabupaten/kota yang termasuk di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan cenderung fluktuatif dan seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan LPE yang cukup besar pada tahun 2020 dengan rata-rata LPE di kawasan tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar -0,953%.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25-



Gambar II.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2019 – 2020

II.2.2 Kondisi Konektivitas

Berikut akan dijelaskan mengenai gambaran umum Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan berdasarkan kondisi konektivitas.

A. Jalan dan Jembatan

Dibandingkan dengan wilayah utara dan tengah di Provinsi Jawa Barat, konektivitas jalan di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dapat dikatakan masih cukup rendah. Disparitas konektivitas jalan antara Jawa Barat Bagian Utara dan Jawa Barat Bagian Tengah terhadap Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terdapat sistem jaringan jalan primer utara dan tengah relatif baik terutama untuk sistem primer horizontal. Sistem jaringan primer lintas vertikal maupun horizontal di selatan masih belum terpenuhi.
2. Kurang lebih 71,76% jaringan jalan ada di wilayah utara dan tengah, sedangkan hanya 28,24% yang ada di wilayah selatan.
3. Tingkat pergerakan di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan relatif lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pergerakan di wilayah Jawa Barat Bagian Utara dan Jawa Barat Bagian Tengah. Hal ini terkait dengan minimnya kegiatan yang menimbulkan bangkitan pergerakan penduduk secara masif untuk menarik aktivitas ekonomi di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

Jaringan jalan yang berada dalam Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan terbagi atas kelompok ruas jalan horizontal dan ruas jalan vertikal dengan rincian sebagai berikut:

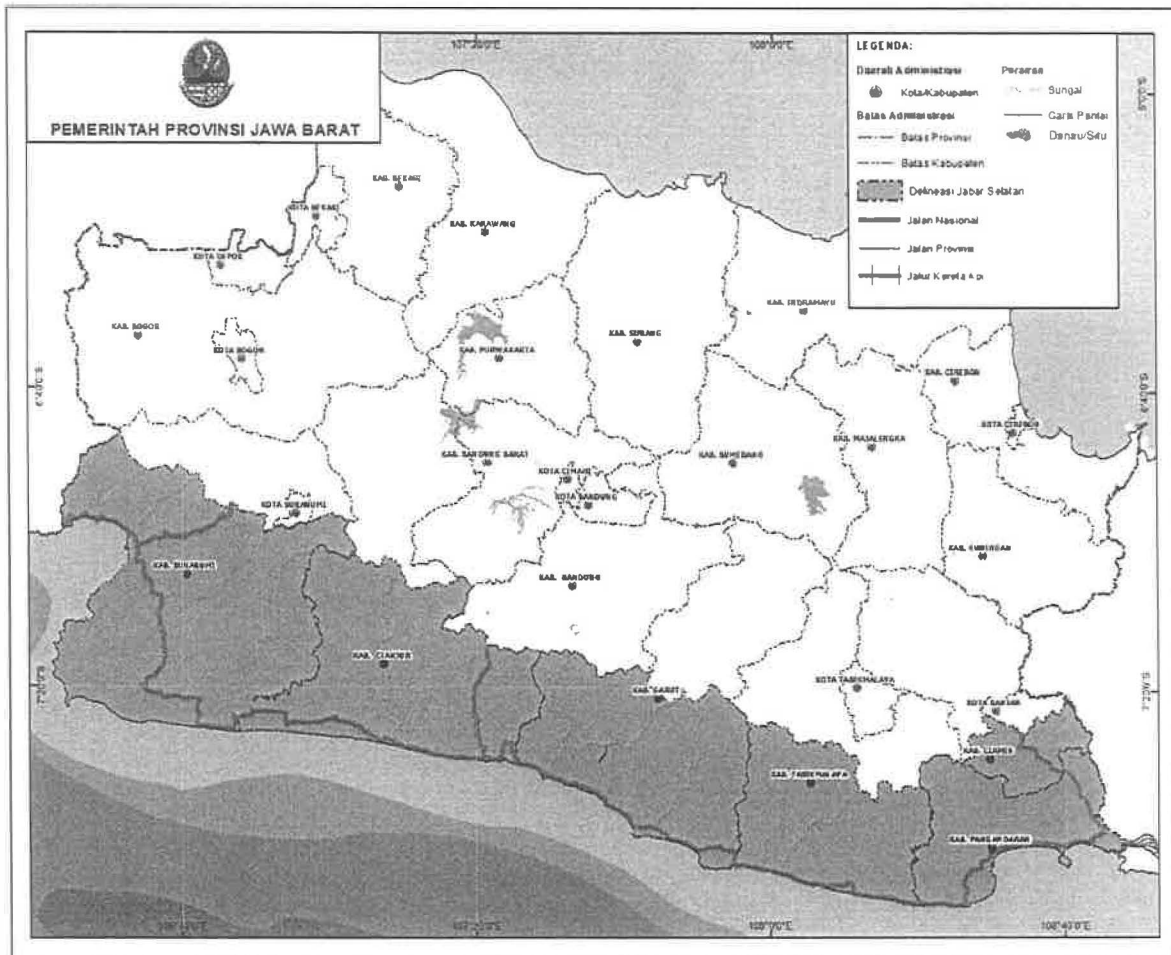
1. Jalur horizontal (arah timur-barat Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan) sepanjang 410,69 km dengan rute memanjang dari barat ke timur, meliputi Cibareno (Batas Provinsi Banten)-Palabuhanratu-Bagbagan-Surade-Tegalbuleud-Sindangbarang-Cidaun-Rancabuaya-Pameungpeuk-Cipatujah-Kalapagenep-Pangandaran-Kalipucang (Batas Provinsi Jawa Tengah).
2. Jalur vertikal (arah utara-selatan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan) dengan jalur vertikal sepanjang 428 km yang terdiri dari beberapa ruas jalan, yaitu:
 - a. Tegalbuleud-Sagaranten-Nyalindung-Sukabumi;
 - b. Sindangbarang-Pagelaran-Tanggeung-Sukanagara-Cianjur;
 - c. Cidaun-Naringgul-Rancabali-Bandung;
 - d. Palembang-Rancabuaya-Sukarame-Cisewu-Talegong-Pangalengan;
 - e. Cijayana-Bungbulang-Cileuleuy-Santosa-Pintu-Pangalengan;
 - f. Cilautereun-Pameungpeuk-Cikajang;
 - g. Cipatujah-Karangnunggal-Sukaraja-Tasikmalaya; dan
 - h. Pangandaran-Kalipucang-Banjar-Ciamis.

Jaringan jalan di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dapat dilihat pada peta berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-27-



**Gambar II.8 Peta Jaringan Jalan di Kawasan
Jawa Barat Bagian Selatan**

B. Terminal

Terminal yang terdapat di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan merupakan terminal penumpang Tipe B, Tipe C, dan sub terminal. Terminal-terminal yang terdapat di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan adalah:

1. Terminal Palabuhanratu di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
2. Terminal Pangandaran di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.

Sub terminal yang terdapat di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan adalah:

1. Terminal Bojong Lopang di Kecamatan Jampang Kulon dan terminal di Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;
2. Terminal di Kecamatan Sindangbarang dan Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-28-

3. Terminal Bungbulang di Kecamatan Bungbulang dan Terminal Pameungpeuk di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut;
4. Terminal Cipatujah di Kecamatan Cipatujah, Terminal Cikalong di Kecamatan Cikalong, dan Terminal Cibalong di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya; dan
5. Terminal Ciamis di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.

Permasalahan dalam pengembangan terminal di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan adalah minimnya pengelolaan dan masih adanya pusat aktivitas, serta pusat kecamatan dengan pergerakan yang relatif tinggi tetapi belum memiliki sarana terminal/sub terminal yang memadai seperti di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, dan Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut.

C. Rel Kereta Api

Jaringan rel kereta api yang terdapat di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan adalah jaringan rel yang menghubungkan Banjarsari-Padaherang-Kalipucang-Pangandaran-Parigi-Cimerak. Kondisi jalur tersebut saat ini kurang terpelihara dan sudah tidak beroperasi. Adanya rel kereta api Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan merupakan salah satu aset potensi transportasi yang sangat besar untuk memudahkan pergerakan barang dan orang.

D. Laut/Pelabuhan

Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Posisi ini memberikan 2 (dua) kondisi strategis, yaitu faktor strategis keamanan nasional berkaitan dengan wilayah perairan nasional dan faktor ekonomis kandungan potensi kelautan Samudra Hindia. Untuk kepentingan 2 (dua) kondisi strategis tersebut maka perhubungan laut menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan transportasi regional di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Pelabuhan yang berhubungan dengan keamanan nasional di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan adalah pelabuhan bagi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Sukabumi.

Pelabuhan jenis lainnya adalah pelabuhan pengumpan, pelabuhan komersial, dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pelabuhan pengumpan yang terdapat di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi difungsikan sebagai pelabuhan transportasi perdagangan dan pangkalan pendaratan ikan. Pelabuhan komersial (penyeberangan) terdapat di Kabupaten Pangandaran, yaitu Pelabuhan Santolo dan Pelabuhan Majingklak di Kecamatan Kalipucang yang menghubungkan Kecamatan Kalipucang dengan Kota Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Selain melayani angkutan penyeberangan, pelabuhan ini juga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-29-

melayani angkutan pariwisata berupa kapal feri dengan kapasitas kurang dari 10 ton.

Pelabuhan nelayan, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan PPI yang berkembang di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan adalah:

1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Kelas B), terletak di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
2. PPI Pangandaran (Kelas D), terletak di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran;
3. PPI Bojongsalawe (Kelas D), terletak di Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran;
4. PPP Cilauteureun (Kelas C), terletak di Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut;
5. PPI Majingklak (Kelas D), terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran;
6. PPI Batukaras (Kelas D), terletak di Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;
7. PPI Legokjawa (Kelas D), terletak di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran;
8. PPI Pamayangsari (Kelas D), terletak di Desa Cikawungading, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya;
9. PPI Sancang (Kelas D), terletak di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut;
10. PPI Cimari (Kelas D), terletak di Desa Cimari, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut;
11. PPI Rancabuaya (Kelas D), terletak di Desa Purbayani, Sukarame, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut;
12. PPI Jayanti (Kelas D), terletak di Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur;
13. PPI Ujung Genteng (Kelas D), terletak di Desa Gunungbatu, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;
14. PPI Loji (Kelas D), terletak di Desa Loji, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
15. PPI Cisolok (Kelas D), terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi; dan
16. PPI Cibamban (Kelas D), terletak di Desa Pasirbaru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.

Permasalahan dalam pengembangan pelabuhan laut di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan adalah rendahnya pemeliharaan untuk setiap pelabuhan yang ada, sehingga beberapa pelabuhan berada dalam kondisi yang tidak terawat. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan kapasitas serta sarana dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-30-

prasarana yang ada untuk melayani bobot kapal/muatan yang lebih besar. Kondisi ini menghambat perkembangan skala penangkapan ikan dan kemungkinan masuknya kapal-kapal dengan kapasitas besar ke pelabuhan ini.

E. Udara/Bandara

Fasilitas perhubungan udara yang terdapat di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan hanya terdapat di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, yaitu Bandara Nusawiru. Bandara Nusawiru berfungsi sebagai bandara komersial. Panjang landasan pacu Bandara Nusawiru adalah 1.400 meter dengan lebar 30 meter dan landasan gelinding (*taxiway*) selebar 20 meter.

Peranan keberadaan dan pelayanan Bandara Nusawiru sangat penting bagi perkembangan pariwisata dan perikanan di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dan sekitarnya, sehingga kondisi fisik dan kualitas pelayanan di Bandara Nusawiru harus terus dipelihara dan ditingkatkan.

II.2.3 Isu Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Beberapa isu di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan antara lain isu infrastruktur, agribisnis dan agroindustri, industri kelautan, dan pariwisata terpadu, untuk lebih lengkapnya akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut.

A. Ketimpangan Wilayah dan Pemerataan Pembangunan

Angka PDRB yang tinggi di Provinsi Jawa Barat sejauh ini didominasi oleh beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat bagian tengah dan barat, sementara kota/kabupaten lainnya terutama di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan hanya dapat menghasilkan sedikit pendapatan bahkan tidak sampai 50% dari pendapatan wilayah lainnya seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor. Perbedaan pendapatan tersebut menyebabkan pembangunan di masing-masing daerah menjadi berbeda. Ketimpangan wilayah tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, namun juga dari segi sosial.

Hal ini secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aspek spasial, dimana secara morfologi, Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan memiliki kondisi morfologi kawasan yang menyebabkan pembangunannya tidak dapat dilakukan secara sporadis sebagaimana pembangunan di wilayah Jawa Barat bagian tengah maupun utara. Banyaknya wilayah hutan dengan fungsi lindung dan konservasi di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan ini menjadikan banyak kawasan yang menjadi *negative list* pembangunan dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya disparitas ekonomi antarkawasan. Terkait hal ini, perlu ada pemetaan sesuai dengan potensi wilayah yang ada, sehingga untuk mengembangkan ekonomi Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan harus dilakukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-31-

pendekatan yang berbeda dengan wilayah utara Provinsi Jawa Barat yang sebagian besar mengusung konsep industrialisasi.

Hal ini juga berkaitan dengan kualitas SDM di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang secara umum berdasarkan tingkat pendidikan berada di bawah wilayah Jawa Barat lainnya. Tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dan nilai jual masyarakat itu sendiri. Pekerja dengan tingkat pendidikan dan kemampuan rendah akan sulit mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang baik.

B. Konektivitas Wilayah

Masih rendahnya tingkat konektivitas Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, baik antarkota/kabupaten atau antarkawasan di dalam Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan itu sendiri maupun antara Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dengan wilayah di bagian utaranya menyebabkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan tidak dapat berjalan dengan optimal. Investasi di berbagai sektor yang telah didorong di wilayah ini terhambat oleh faktor keterbatasan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, terutama dalam konteks aksesibilitas antarwilayah. Hal ini pula yang menyebabkan masih cukup banyak kawasan di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang masih tergolong ke dalam kategori wilayah tertinggal.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipacu dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai akan berujung pada terciptanya konektivitas antarwilayah. Dalam konteks Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, peningkatan konektivitas perlu didorong melalui berbagai jalur, mulai dari darat, laut, serta udara. Dalam konteks konektivitas darat, terdapat potensi pengembangan Jalur Tengah Selatan (JTS) sebagai poros barat-timur yang dapat menghubungkan kota/kabupaten di wilayah selatan Jawa Barat. Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang berbatasan dengan laut juga menghasilkan potensi peningkatan konektivitas melalui jalur laut. Selain itu, pada beberapa kabupaten di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan juga terdapat bandara perintis yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah melalui jalur udara.

C. Optimalisasi Potensi dan Komoditas Daerah

Merujuk pada kondisi morfologi kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kondisi sumber daya baik sumber daya alam maupun SDM di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, maka potensi daerah yang layak dan berpotensi untuk didorong dan dikembangkan berada dalam lingkup pertanian (agribisnis), kelautan dan perikanan, serta pariwisata. Beberapa isu yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-32-

berkaitan dengan pengembangan ketiga sektor unggulan di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan ini antara lain:

1. Besarnya potensi pertanian belum diimbangi dengan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti jaringan irigasi;
2. Penguatan armada dalam usaha perikanan serta peningkatan skala usaha untuk memperluas jangkauan penangkapan;
3. Pengelolaan pelabuhan perikanan belum berjalan baik;
4. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha pemanfaatan potensi sumber daya kelautan secara efisien dan berkelanjutan;
5. Akses permodalan dan akses pasar untuk pengembangan usaha perikanan;
6. Kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung (khususnya transportasi) destinasi wisata, terutama dalam konteks aksesibilitas;
7. Kesiapan dan kualitas SDM/masyarakat lokal untuk terlibat dan mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah; dan
8. Kerentanan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami.

II.2.4 Keunggulan Komparatif Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Berbeda dengan wilayah Jawa Barat pada umumnya yang perekonomiannya ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar, kecil, dan eceran, serta konstruksi, sektor ekonomi potensial di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan lebih mengarah pada sektor agroindustri, perikanan, dan pariwisata. Hal ini mengingat morfologi dan kondisi geografis Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang didominasi oleh lahan dengan limitasi pembangunan fisik, posisi yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, serta bentang alam yang banyak memiliki daya tarik wisata.

Pada sektor perkebunan, keunggulan komparatif Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan berada pada beberapa komoditas antara lain:

1. Kakao, di mana wilayah produksi terbesarnya berada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut;
2. Kopi, di mana wilayah produksi terbesarnya berada di wilayah Kabupaten Pangandaran;
3. Aren, di mana wilayah produksi terbesarnya berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur;
4. Karet, di mana wilayah produksi terbesarnya berada di wilayah Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Sukabumi; dan
5. Kelapa, di mana wilayah produksi terbesarnya berada di wilayah Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-33-

Pada sektor tanaman pangan dan hortikultura, keunggulan komparatif Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan berada pada beberapa komoditas antara lain:

1. Manggis, di mana wilayah produksi terbesarnya berada di wilayah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut;
2. Padi organik, di mana wilayah produksi terbesarnya berada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran; dan
3. Jagung, di mana wilayah produksi terbesarnya berada di wilayah Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur.

Pada sektor budi daya perikanan, keunggulan komparatif Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan berada pada beberapa komoditas antara lain:

1. Udang Vaname, di mana wilayah produksi terbesarnya berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Lobster, di mana wilayah produksi terbesarnya berada di wilayah Kabupaten Sukabumi; dan
3. Garam, di mana wilayah produksi terbesarnya berada di wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Pangandaran.

Pada sektor pariwisata, Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan memiliki berbagai potensi daya tarik wisata yang terbentang dari ujung sebelah barat hingga ujung sebelah timur, di mana beberapa diantaranya memiliki nilai strategis pada level nasional hingga internasional. Di sebelah barat terdapat Taman Nasional Ujung Kulon serta kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO *Global Geopark*. Menyusuri pantai selatan Jawa Barat, terdapat beberapa pantai yang menjadi daya tarik wisata, antara lain Pantai Santolo, Pantai Karang Tawulan, serta Pantai Pangandaran. Selain itu, kawasan Pantai Pangandaran dan sekitarnya dalam Rencana Induk Pariwisata Nasional juga ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

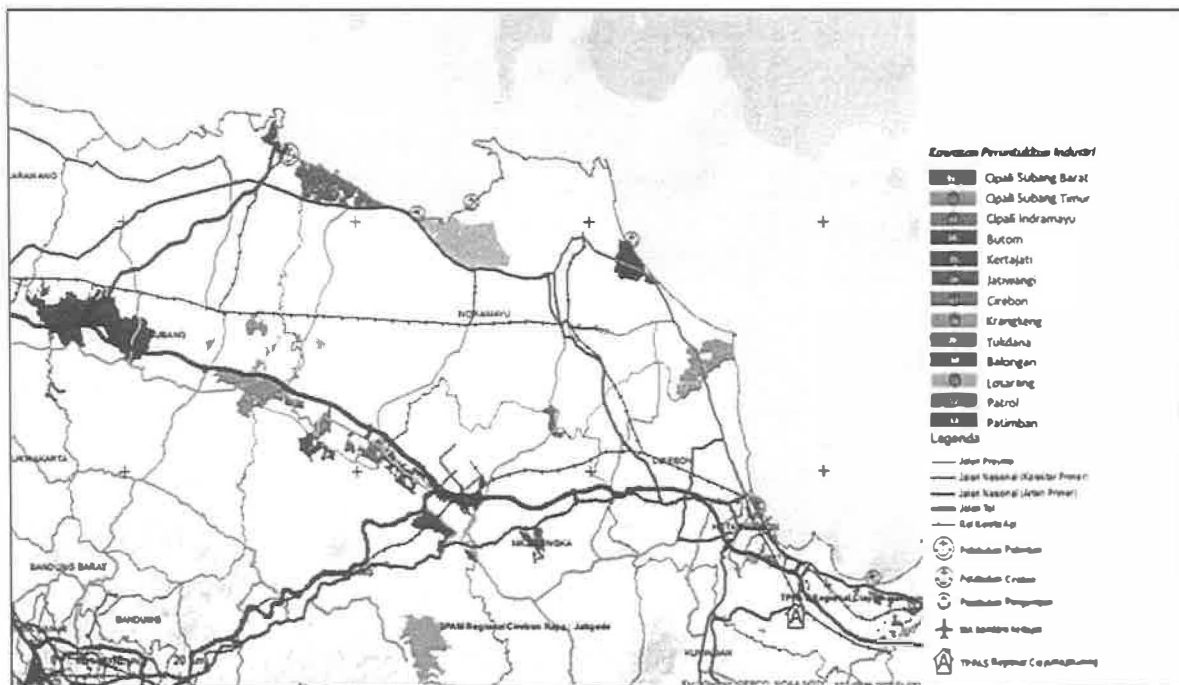
-34-

BAB III ARAH PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS

III.1 KAWASAN REBANA

III.1.1 Arah Pengembangan Kawasan Rebana

Rencana pembangunan Kawasan Rebana berlokasi pada 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon. Terdapat 13 (tiga belas) titik pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Terdapat 3 (tiga) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Subang, 6 (enam) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Indramayu, 2 (dua) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Majalengka, 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Sumedang, dan 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Cirebon. Seluruh pengembangan kawasan tersebut berbasis *ecoindustry*, yang dilakukan melalui pembangunan *eco-industrial park* atau kawasan industri berwawasan lingkungan.



Gambar III.1 Titik Pengembangan Kawasan Rebana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

Tabel III.1 Arah Fungsi Kawasan

KAWASAN	JENIS KAWASAN	KECAMATAN	PUSAT PELAYANAN
Kertajati	KPI	Kertajati	Kawasan Perkotaan Inti
Jatiwangi	KPI dan SIKM	Jatiwangi	Kawasan Perkotaan Sekitarnya
Lengkong	SIKM	Sindangwangi	SIKM
Kadipaten	Kawasan Perkotaan	Kadipaten	PKW
Majalengka	Kawasan Perkotaan	Majalengka	PKL
KPI Cirebon	KPI	Ciledug	Kawasan Perkotaan Sekitarnya
		Lemahabang	
		Mundu	
		Greged	
		Astanajapura	
		Pangenan	
		Karangsembung	
		Gebang	
		Babakan	
		Losari	
		Pabedilan	
Mertasinga	SIKM	Gunungjati	SIKM
Trusmi Kulon	SIKM	Plered	SIKM
Tegalgubug	SIKM	Arjawinangun	SIKM
Rawaurip	SIKM	Pangenan	SIKM
Tegalwangi	SIKM	Weru	SIKM
Gempol	SIKM	Gempol	SIKM
Bobos	SIKM	Dukupuntang	SIKM
Sumber	Kawasan Perkotaan	Sumber	PKL
Arjawinangun	Kawasan Perkotaan	Arjawinangun	PKL
Palimanan	Kawasan Perkotaan	Palimanan	PKL
Galmantoro	Kawasan Perdesaan	Weru	Pusat Kawasan Perdesaan - Desa Tegalwangi
Gempol	Kawasan Perdesaan	Gempol	Pusat Kawasan Perdesaan - Desa Cikeusal
Patimban	KPI/ Kota Baru	Pusakanagara	Kawasan Perkotaan Inti
Cipali-Subang Barat	KPI	Pabuaran	Kawasan Perkotaan Sekitarnya
		Cipeundeuy	
		Kalijati	
		Purwodadi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

KAWASAN	JENIS KAWASAN	KECAMATAN	PUSAT PELAYANAN
		Cikaum	
Cipali-Subang Timur	KPI	Pagaden Cibogo	Kawasan Perkotaan Sekitarnya
Kota Subang	Kawasan Perkotaan	Subang	PKL
Pamanukan	Kawasan Perkotaan	Pamanukan	PKL
Pagaden	Kawasan Perkotaan	Pagaden	PKL
Pagaden Barat	Kawasan Perdesaan	Pagaden Barat	Pusat Kawasan Perdesaan - Desa Balingbing
Cijambe	Kawasan Perdesaan	Cijambe	Pusat Kawasan Perdesaan - Desa Cikadu
Tukdana	KPI	Tukdana	Kawasan Perkotaan Sekitarnya
Losarang	KPI	Losarang	Kawasan Perkotaan Sekitarnya
		Cantigi	
		Lohbener	
Balongan	KPI	Juntinyuat	Kawasan Perkotaan Sekitarnya
Cipali-Indramayu	KPI	Gantar	Kawasan Perkotaan Sekitarnya
		Terisi	
Patrol	KPI	Sukra	Kawasan Perkotaan Sekitarnya
		Patrol	
		Kandanghaur	
Krangkeng	KPI	Krangkeng	Kawasan Perkotaan Sekitarnya
Sumuradem	SIKM	Sukra	SIKM
Kenanga	SIKM	Siindang	SIKM
Kasmaran	SIKM	Widasari	SIKM
Paoman	SIKM	Indramayu	SIKM
Kepandean	SIKM	Indramayu	SIKM
Tambi	SIKM	Sliyeg	SIKM
Losarang	SIKM	Losarang	SIKM
Parean Girang	SIKM	Kandanghaur	SIKM
Krangkeng	SIKM	Krangkeng	SIKM
Indramayu	Kawasan Perkotaan	Indramayu	PKW
Karangampel	Kawasan Perkotaan	Karangampel	PKL
Jatibarang	Kawasan Perkotaan	Jatibarang	PKL
Krangkeng	Kawasan Perdesaan	Krangkeng dan Kedokan Bunder	Pusat Kawasan Perdesaan - Desa Kedokan Agung
Cilimus	Kawasan Perkotaan	Cilimus	PKL
Mandirancan	Kawasan Perdesaan	Mandirancan	Pusat Kawasan Perdesaan - Desa Setianegara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-37-

KAWASAN	JENIS KAWASAN	KECAMATAN	PUSAT PELAYANAN
Pasawahan	Kawasan Perdesaan	Pasawahan	Pusat Kawasan Perdesaan - Desa Padaherang
Cigandamekar	SIKM	Cigandamekar	SIKM
Kota Cirebon	Kawasan Perkotaan	Seluruh Kecamatan	Kawasan Perkotaan Inti
Butom	KPI	Buahdua	Kawasan Perkotaan Sekitarnya
		Ujungjaya	
		Tomo	

Keterangan: KPI = Kawasan Peruntukan Industri

SIKM = Sentra Industri Kecil dan Menengah

PKW = Pusat Kegiatan Wilayah

PKL = Pusat Kegiatan Lokal

III.1.2 Rencana Struktur Ruang

Sistem perkotaan yang melingkupi Kawasan Rebana terdiri atas:

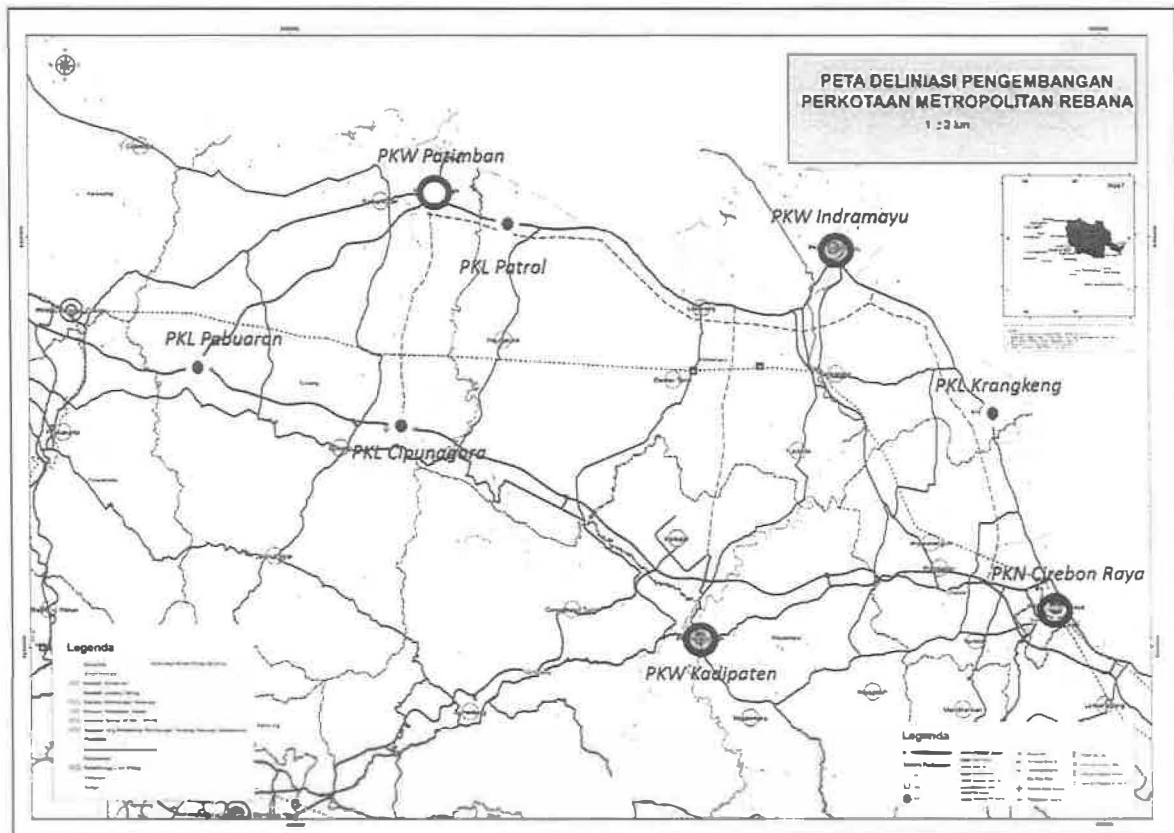
1. Kota Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dengan peran untuk melayani kegiatan skala internasional;
2. Patimban, Kadipaten-Kertajati, dan Indramayu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan peran untuk melayani kegiatan skala nasional; dan
3. Pabuaran, Cipunagara, Patrol, dan Krangkeng sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota sekitarnya.

Secara spasial, sistem perkotaan yang melingkupi Kawasan Rebana digambarkan melalui peta berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-38-



Gambar III.2 Peta Sistem Perkotaan Kawasan Rebana

III.1.3 Konsep Pengembangan

Konsep pengembangan yang digunakan dalam mengembangkan Kawasan Rebana adalah *Polycentric Smart Region*. Konsep *polycentric* berarti kawasan ini memiliki inti ganda yang memfasilitasi kawasan sesuai dengan fungsinya masing-masing tanpa bertentangan satu sama lain. Adapun konsep *smart region* adalah suatu jenis konsep pengembangan kawasan geografis, yang melalui kebijakan bersama, mampu meningkatkan daya saing dan daya tarik kawasan, dengan perhatian khusus terhadap kepaduan sosial, penyebaran pengetahuan, pertumbuhan kreativitas, aksesibilitas dan kebebasan bergerak, kegunaan lingkungan (alami, sejarah, arsitektur, persebaran perkotaan), kualitas lanskap, dan kehidupan masyarakatnya. Pembagian fungsional kawasan yang terletak di Kawasan Rebana terdiri atas:

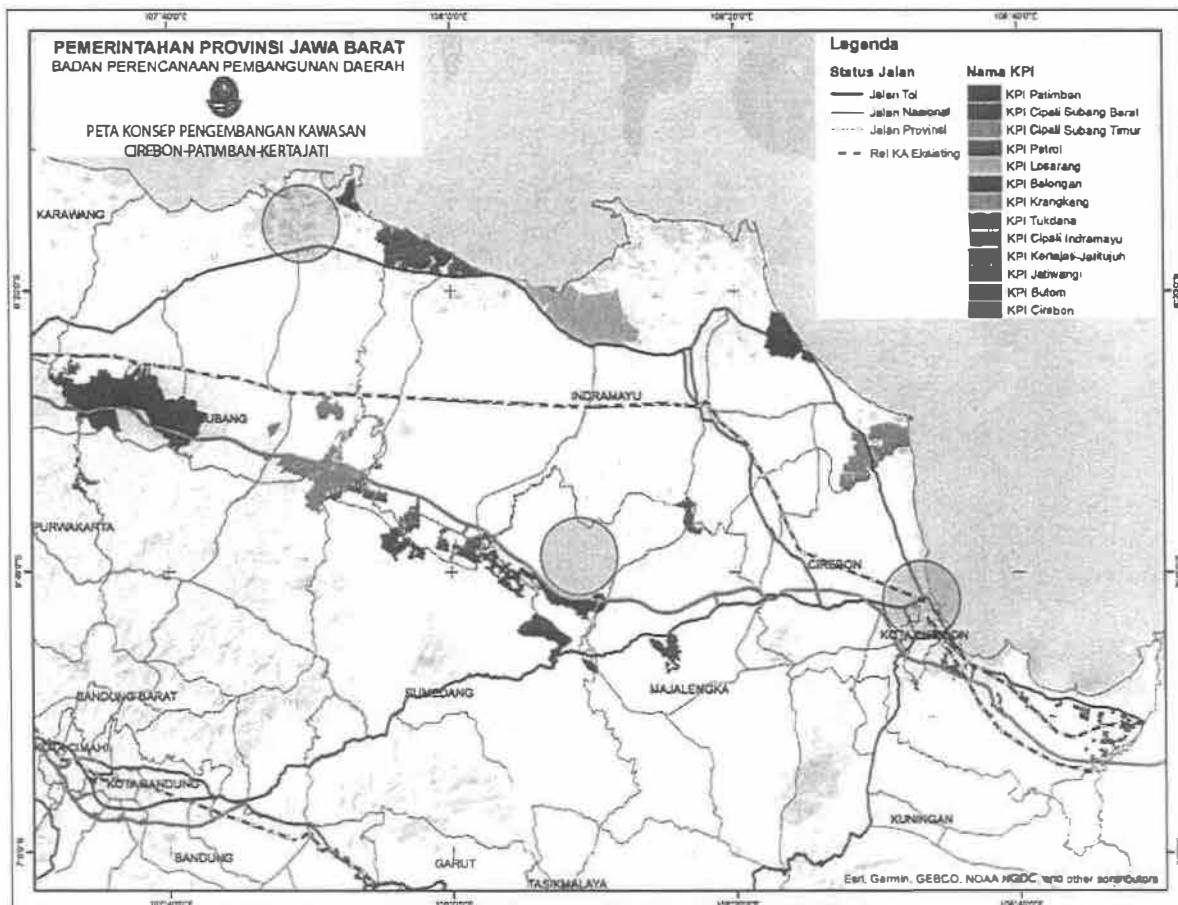
1. Kota Cirebon, Kota Patimban, dan Kertajati *Aerocity* sebagai kawasan perkotaan inti; dan
2. KPI Patimban, KPI Cipali Subang Barat, KPI Cipali Subang Timur, KPI Cipali Indramayu, KPI Patrol, KPI Losarang, KPI Balongan, KPI Krangkeng, KPI Tukdana, KPI Kertajati, KPI Jatiwangi, KPI Butom, dan KPI Cirebon sebagai kawasan aktivitas utama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-39-

Secara spasial, konsep pengembangan Kawasan Rebana digambarkan melalui peta berikut.



Gambar III.3 Peta Konsep Pengembangan Kawasan Rebana

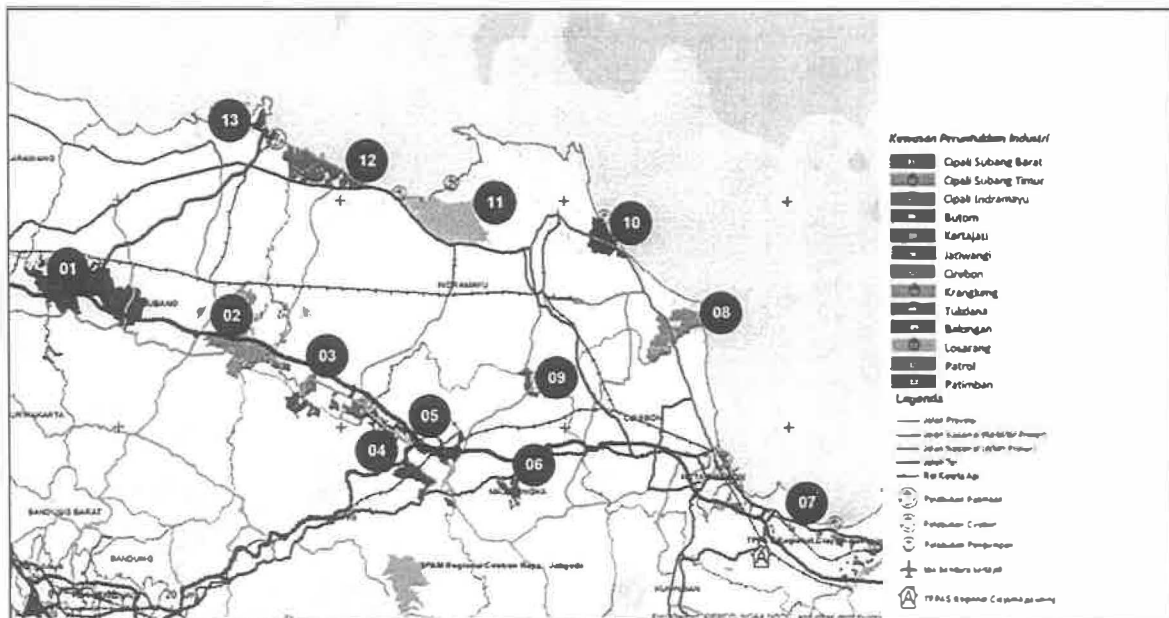
III.1.4 Arah Pengembangan Investasi

Arah pengembangan Investasi Kawasan Rebana ditentukan berdasarkan kluster industri yang tersebar di 13 (tiga belas) titik KPI. Ketiga belas KPI ini lokasinya tersebar pada 6 (enam) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Pengembangan investasi pada ketiga belas KPI ini diarahkan pada pengembangan Kawasan Industri (KI) yang bersifat holistik dan integratif, tidak hanya berfokus pada pengembangan sektor industrinya saja, melainkan juga pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung atau penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai. Pengembangan KI pada ketiga belas KPI ini diharapkan dapat menjadi *trigger* pertumbuhan ekonomi kawasan perkotaan secara umum dengan industri sebagai kegiatan utamanya. Berikut adalah peta dan tabel arahan pengembangan investasi di Kawasan Rebana.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-40-



Gambar III.4 Titik Pengembangan Kawasan Rebanan

Tabel III.2 Arah Pengembangan Spesialisasi Investasi Kawasan Rebanan

No.	KPI	LOKASI	SPELIALISASI INVESTASI
1.	KPI Patimban	Subang	Industri pengolahan makanan, logam, mesin, elektronika, metal, dan logistik dan pergudangan terpadu
2.	KPI Cipali Subang Barat	Subang	Industri kertas dan karton, pengolahan makanan dan minuman, logam, mesin, elektronika/metal, dan alat transportasi
3.	KPI Cipali Subang Timur	Subang	Industri pengolahan makanan, logam, mesin, elektronika, metal, pertahanan, alat transportasi (otomotif dan perkapalan), dan logistik (<i>dry port</i>)
4.	KPI Krangkeng	Indramayu	Industri kimia hulu (pengolahan garam), bahan penolong, kimia dasar berbasis migas dan batu bara, hulu agro, petrokimia hulu, resin sintetik dan bahan plastik, pengolahan bahan makanan, dan perkapalan
5.	KPI Patrol	Indramayu	Industri kimia hulu (pengolahan garam), pengolahan ikan, bahan penolong, kimia dasar berbasis migas dan batu bara, hulu agro, petrokimia hulu, resin sintetik dan bahan plastik, dan perkapalan
6.	KPI Losarang	Indramayu	Industri kimia hulu (pengolahan garam), pengolahan ikan, bahan penolong, kimia dasar berbasis migas dan batu bara, hulu agro, petrokimia hulu, dan resin sintetik dan bahan plastik
7.	KPI Balongan	Indramayu	Industri kimia hulu (pengolahan garam), pengolahan ikan, bahan penolong, kimia dasar berbasis migas dan batu bara, hulu agro, petrokimia hulu, dan resin sintetik dan bahan plastik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-41-

No.	KPI	LOKASI	SPELIALISASI INVESTASI
8.	KPI Tukdana	Indramayu	Industri kimia hulu (pengolahan garam), pengolahan makanan dan minuman, mesin dan alat pertanian, bahan penolong, hulu agro, petrokimia hulu, dan resin sintetik dan bahan plastik
9.	KPI Cipali Indramayu	Indramayu	Industri kimia hulu (pengolahan garam), pengolahan ikan, bahan penolong, kimia dasar berbasis migas dan batubara, hulu agro, petrokimia hulu, resin sintetik dan bahan plastik, pengolahan bahan makanan, <i>metal stamping electrical automotive, knitting</i> (rajut) dan garmen, dan ban dalam dan ban luar sepeda motor
10.	KPI Kertajati Jatitujuh	Majalengka	Penerbangan, kargo/logistik, industri elektronik, sensor, robotika, alat angkut berbasis elektrik, pertahanan, tekstil, pengolahan makanan dan minuman, dan resin sintetik dan bahan plastik
11.	KPI Jatiwangi	Majalengka	Industri tekstil, pengolahan makanan dan minuman, resin sintetik dan plastik, bahan bangunan, pengolahan <i>hotmix</i> dan beton, dan furnitur dan barang dari kayu SIKM Penyedia bahan baku dan bahan setengah jadi industri bahan bangunan dan perumahan
12.	KPI Butom	Sumedang	Industri pengolahan makanan dan minuman, tekstil, logistik dan pergudangan, agroindustri, dan furnitur dan barang dari kayu
13.	KPI Cirebon	Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon	Industri pengolahan makanan dan minuman, furnitur dan barang dari kayu, perkapalan, pakan, bahan galian nonlogam, bahan bangunan, pengolahan garam konsulasi, dan pengolahan <i>hotmix</i> dan beton

III.2 KAWASAN JAWA BARAT BAGIAN SELATAN

III.2.1 Arah Pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Rencana pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan berlokasi pada 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, meliputi Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Keenam kabupaten tersebut merupakan titik pengembangan yang akan dikembangkan di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kabupaten Pangandaran diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis pariwisata serta kegiatan perikanan;
2. Kabupaten Ciamis diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis;
3. Kabupaten Tasikmalaya diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan perikanan;
4. Kabupaten Garut diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-42-

5. Kabupaten Cianjur diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan; dan
6. Kabupaten Sukabumi diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis pariwisata serta kegiatan perikanan.

Kawasan pengembangan pada kabupaten-kabupaten tersebut didukung dengan pembangunan serta pengembangan infrastruktur yang mendukung masing-masing program di setiap wilayah, baik dari pengembangan infrastruktur dasar, perhubungan, jalan, sumber daya air, serta infrastruktur lainnya.

III.2.2 Rencana Struktur Ruang

Sistem perkotaan yang melingkupi Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan terdiri atas:

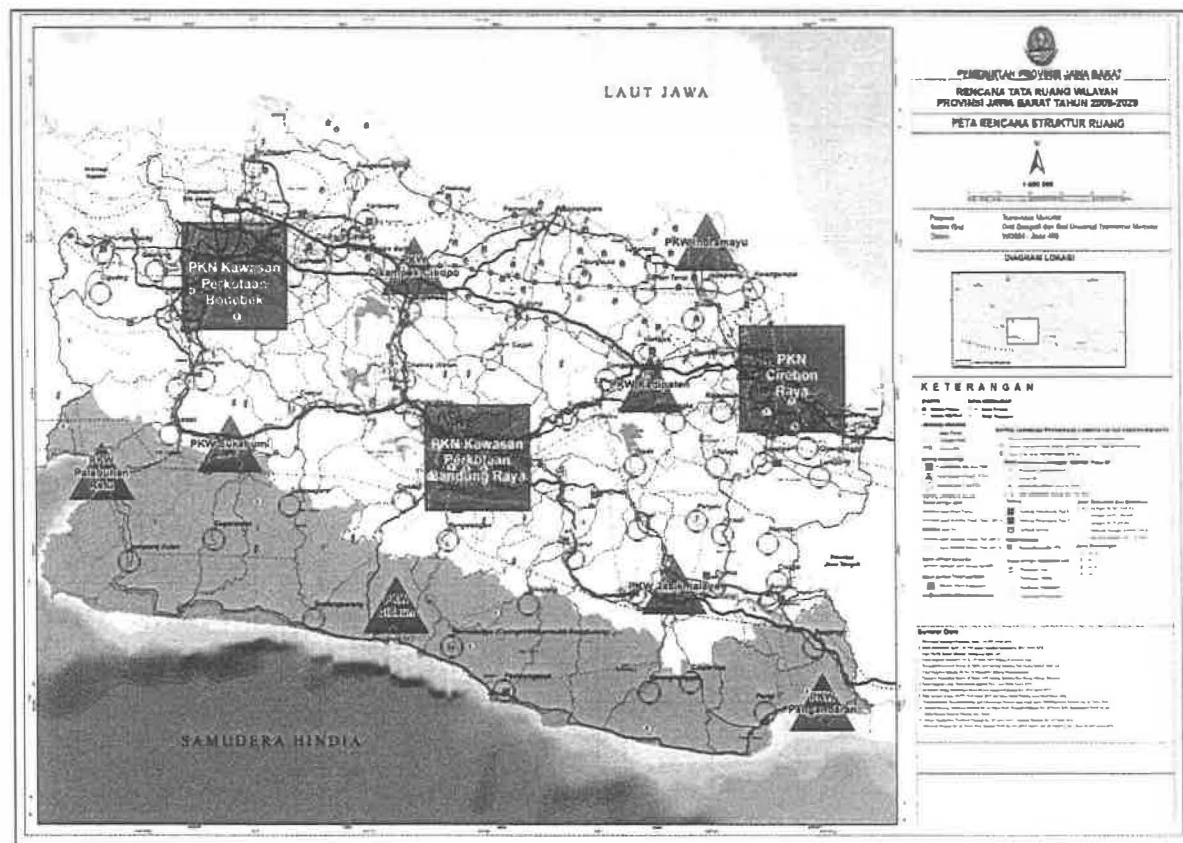
1. Pangandaran dan Palabuhanratu, serta Kota Sukabumi dan Cidaun sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dengan peran untuk melayani kegiatan skala nasional;
2. Rancabuaya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan;
3. Kawasan Banjarsari sebagai PKL, dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan; dan
4. Jampang Kulon, Sagaranten, Sukanagara, Sindangbarang, Cikajang, Pameungpeuk, Karangnunggal, Cikatomas, dan Parigi sebagai PKL, dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan.

Secara spasial, sistem perkotaan yang melingkupi Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada peta di bawah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-43-



Gambar III.5 Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

III.2.3 Konsep Pengembangan

Konsep pengembangan yang digunakan dalam pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan adalah konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis sumber daya alam. Konsep pengembangan wilayah terpadu diharapkan dapat menghasilkan *spread-effect* yang akan memberikan pengaruh positif antar wilayah yang dapat menghasilkan keseimbangan pembangunan wilayah dengan memanfaatkan potensi dari tiga sektor yang ada di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, yaitu agribisnis, perikanan, serta pariwisata.

III.2.4 Arah Pengembangan Investasi

Arah pengembangan investasi untuk Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan terbagi atas sektor perdagangan, perkebunan, pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Pembahasan terkait masing-masing sektor adalah sebagai berikut.

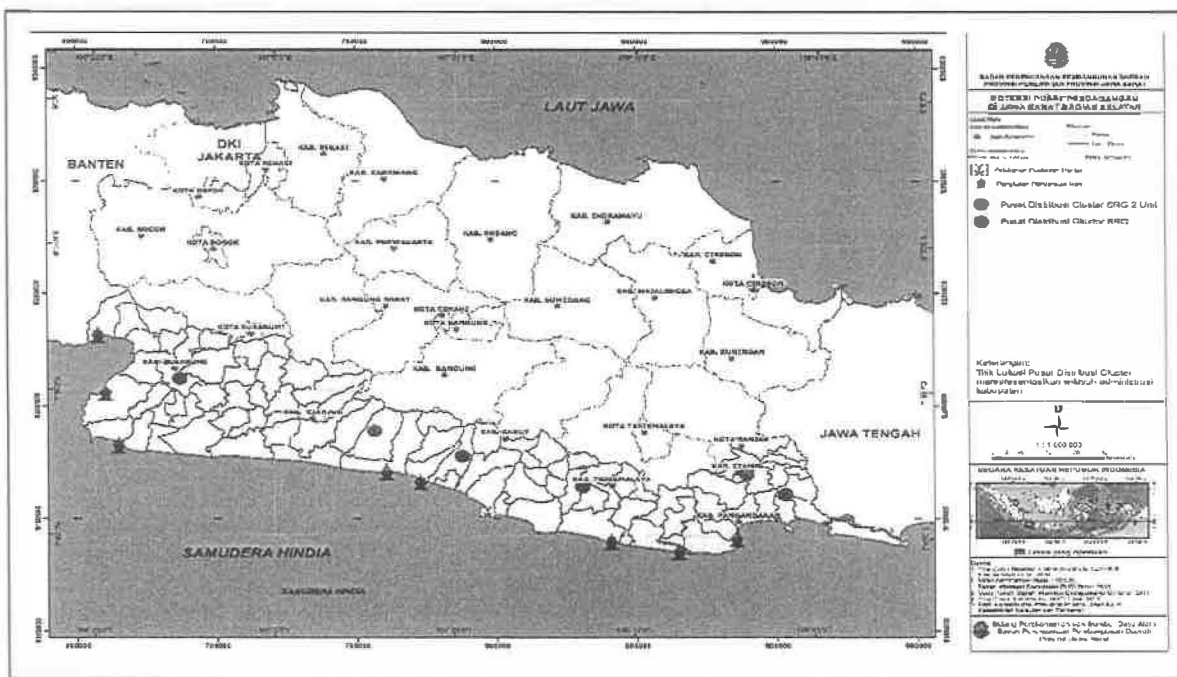


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-44-

A. Perdagangan

Perwujudan ruang investasi sektor perekonomian untuk bidang perdagangan diarahkan pada pembangunan sarana distribusi perdagangan, berupa pusat distribusi klaster Sistem Resi Gudang (SRG) 2 (dua) unit, dan pusat distribusi klaster SRG. Pada Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, terdapat pusat distribusi klaster SRG 2 (dua) Unit di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Ciamis. Pusat distribusi klaster SRG terdapat di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.



Gambar III.6 Peta Potensi Pusat Perdagangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

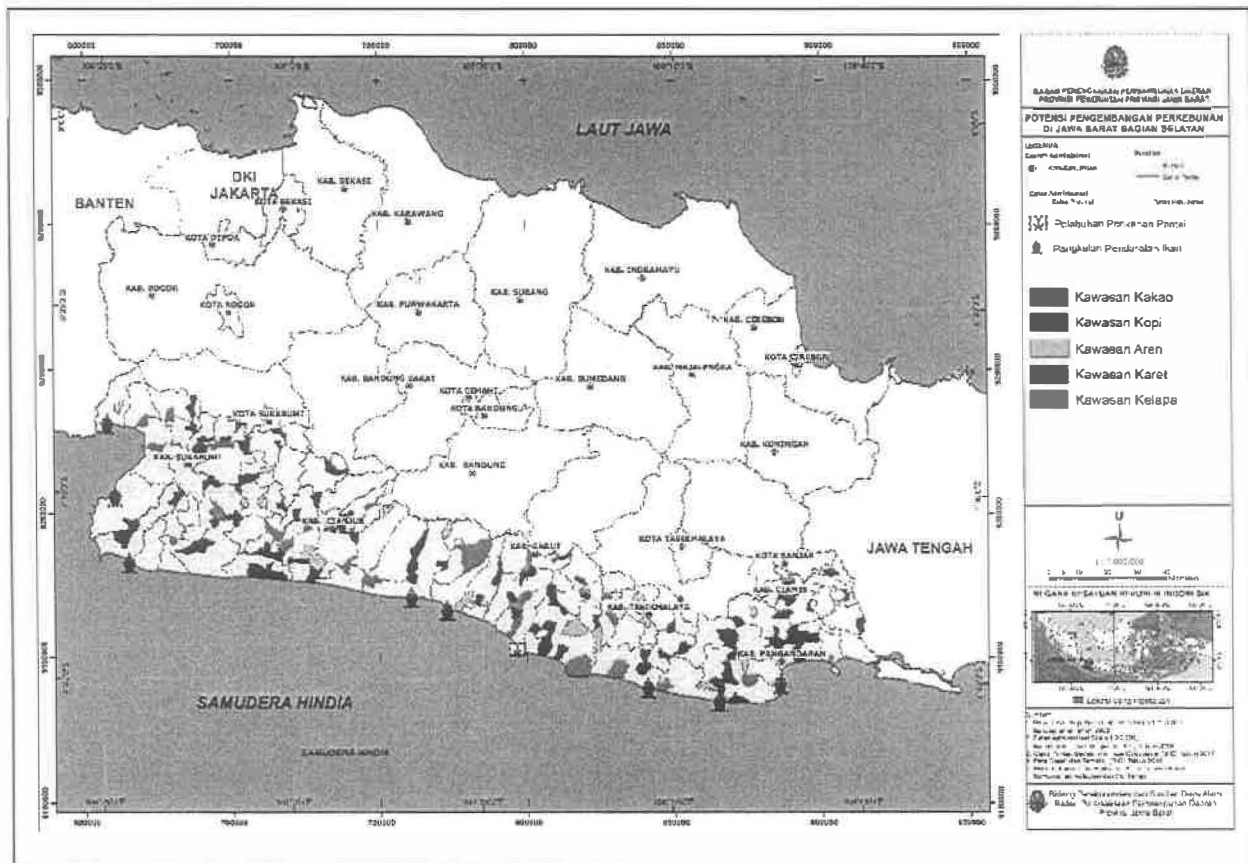
B. Perkebunan

Perwujudan ruang investasi sektor perekonomian bidang perkebunan diarahkan pada pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi, pengembangan sistem informasi, pengembangan desa kopi organik, pembangunan sub terminal agribisnis kelapa, kopi, dan teh. Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan memiliki potensi perkebunan sebagai penghasil kakao, kopi, aren, karet, dan kelapa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-45-



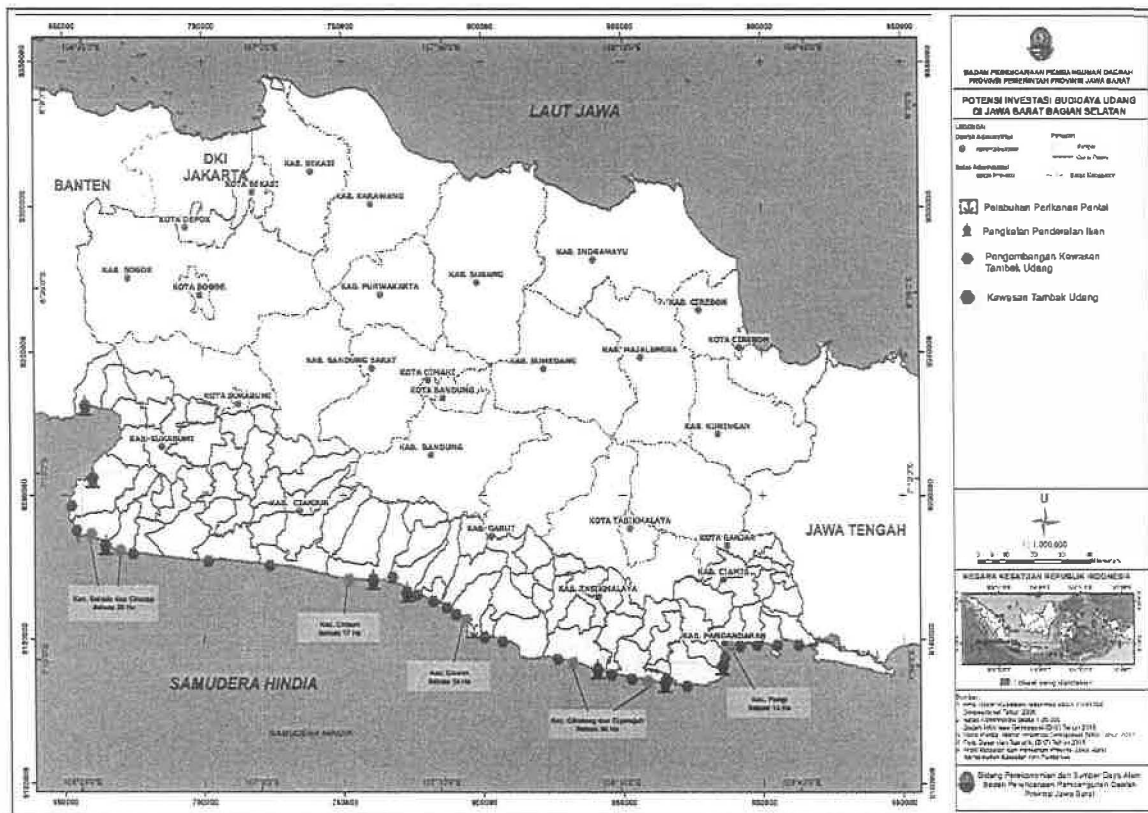
**Gambar III.7 Peta Potensi Pengembangan Perkebunan
Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan**

Perwujudan ruang investasi sektor perkebunan bidang hortikultura, diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura, dan penerapan teknologi budi daya tanaman hortikultura berkelanjutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-47-



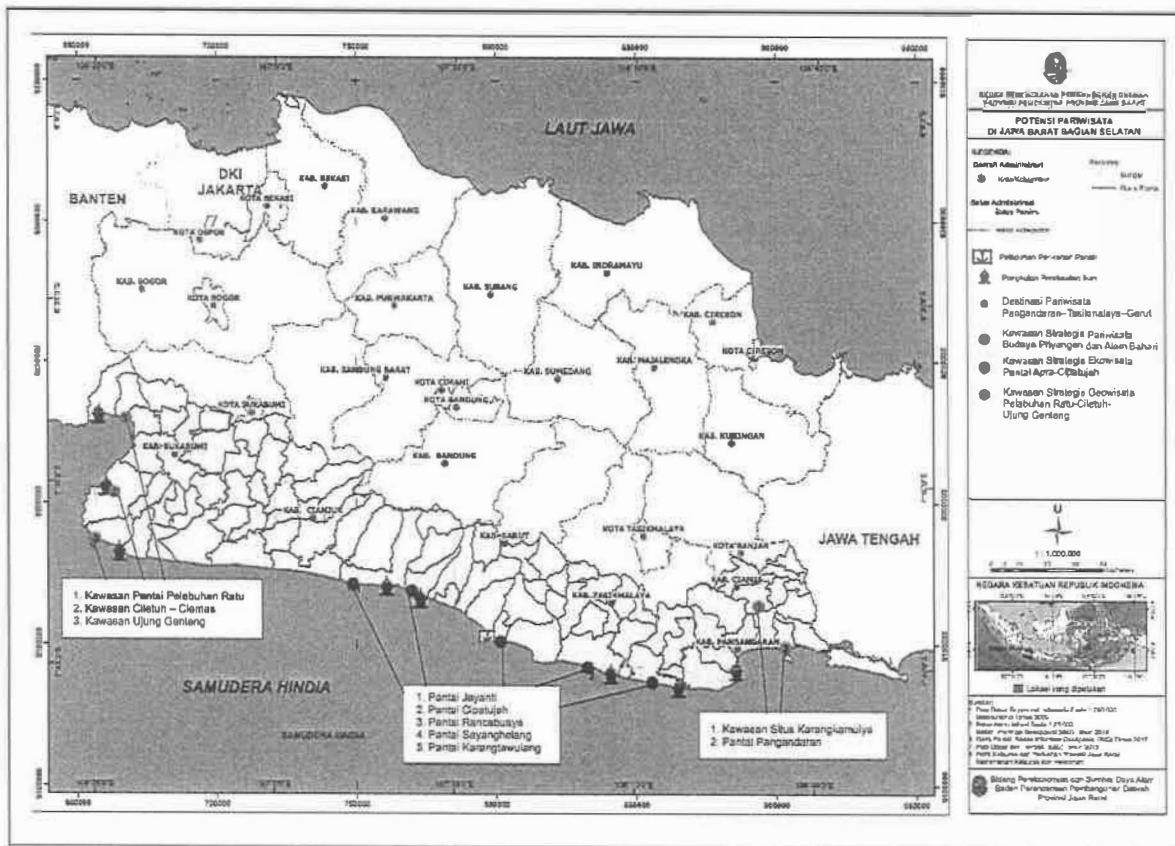
Gambar III.9 Peta Pelabuhan Perikanan Pantai dan Investasi Budi Daya Udang Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Perwujudan ruang investasi sektor perekonomian bidang pengembangan kluster ternak dan perikanan diarahkan pada pengembangan minapolitan, pengembangan fasilitas bisnis perikanan laut, serta pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan. Pada Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, pengembangan kluster diarahkan pada pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan pengembangan kluster ternak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-49-



**Gambar III.11 Peta Potensi Pariwisata
Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-50-

BAB IV RENCANA INDUK

IV.1 RENCANA INDUK KAWASAN REBANA

Rencana Induk pengembangan Kawasan Rebana memuat rencana proyek dan program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021-2030. Penyusunan proyek dan program dalam Rencana Induk disertai dengan judul, lokasi, tahun pelaksanaan, penanggung jawab, indikasi anggaran, serta sumber dana. Rencana proyek dan program mengarah pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan Kawasan Rebana terdiri dari:

1. Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Jalan;
2. Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan;
3. Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar;
4. Rencana Induk Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
5. Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Lainnya.

Secara rinci, uraian Rencana Induk untuk masing-masing poin sebagaimana disebutkan di atas diuraikan sebagai berikut.

A. Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Jalan

Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Jalan berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari Rencana Induk ini, yaitu:

1. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan; dan
2. Pembangunan dan Peningkatan Jalan.

Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Transportasi Jalan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.1.

B. Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan

Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari Rencana Induk ini, yaitu perencanaan sistem jaringan transportasi darat.

Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-51-

C. Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar

Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari Rencana Induk ini, yaitu:

1. Sarana dan Prasarana Persampahan;
2. Sarana dan Prasarana Air Limbah; dan
3. Sarana dan Prasarana Permukiman.

Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.3.

D. Rencana Induk Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Rencana Induk Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari Rencana Induk ini, yaitu:

1. Pembangunan Waduk/Bendungan;
2. Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir; dan
3. Infrastruktur Irigasi.

Rencana Induk Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.4.

E. Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Lainnya

Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Lainnya berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari Rencana Induk ini, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia;
2. Daya Saing Kawasan;
3. Sarana dan Prasarana Kesehatan;
4. Infrastruktur Energi; dan
5. Pengembangan Kawasan Industri.

Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Lainnya untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-52-

**Tabel IV.1 Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur
Transportasi Jalan Kawasan Rebana**

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU
A.	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan												17.510.000				
1.	Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Seksi 3-6)	Kab. Sumedang, Kab. Majalengka											Kementerian PUPR	5.580.000			v
2.	Pembangunan Akses Tol Cipali (Subang KM 89 Patimban)	Kab. Subang											Kementerian PUPR	3.880.000			v
3.	Pembangunan <i>interchange</i> KM 115 (Manyingsal) Cipali – Patimban	Kec. Cipunagara, Kab. Subang											Kementerian PUPR	850.000			v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-53-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU
4.	Pembangunan Jalan Tol Kertajati-Indramayu	Kab. Majalengka, Kab. Indramayu											Kementerian PUPR	7.200.000			v
B.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan												5.824.712				
5.	Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Subang	Kab. Subang											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	969.000	v	v	
6.	Pembangunan Jalur Pamanukan - Patimban	Kab. Subang											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	27.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-54-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU
7.	Pembangunan Jalur Cilamaya- Patimban	Kab. Subang											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	630.000	v	v	
8.	Pembangunan Jalur Sarangpanjang - Cipeundeuy	Kab. Subang											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	1.492.000	v	v	
9.	Pembangunan Jalan Akses Cisumdawu – BIJB	Kab. Majalengka											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	1.500.000	v	v	v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-55-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU	
10.	Pembangunan Jalan Bantarwaru - Haurgeulis - Patrol	Kab. Indramayu												a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	130.120	v	v	
11.	Pembangunan Jalan Lingkar Cigugur - Cisantana	Kab. Kuningan												a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	25.000	v	v	
12.	Pembangunan Jalan Alternatif Ruas Jalan Nasional Cirebon - Ciamis (Segmen Cipasung - Cikijing - Panawangan)	Kab. Kuningan, Kab. Majalengka												a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	50.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-56-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU
13.	Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan	Kab. Kuningan											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	310.000	v	v	
14.	Pembangunan Jalan Lingkar Sumber - Talun Cisaat	Kab. Cirebon											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	220.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-57-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU
15.	Pelebaran Jalan dan Jembatan Jatitujuh – Ligung	Kab. Majalengka											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	21.740	v	v	
16.	Pelebaran Jalan Legok - Conggeang (<i>Interchange</i> Cisumdawu-Legok)	Kab. Sumedang											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	34.400	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-58-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPB
17.	Pelebaran Jalan Conggeang – Buah Dua	Kab. Sumedang											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	25.000	v	v	
18.	Pelebaran Jalan Cimalaka – Cipadung (<i>Interchange</i> Cisumdawu – Cimalaka)	Kab. Sumedang											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	36.600	v	v	
19.	Pelebaran Jalan Conggeang – Ujungjaya	Kab. Sumedang											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	91.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-59-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU
20.	Peningkatan Jalan Cipeundeuy – Pabuaran	Kab. Subang											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	55.500	v	v	
21.	Pelebaran Jalan Kabupaten (Pusakanegara – Patimban)	Kab. Subang											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	48.500	v	v	
22.	Pelebaran Jalan Provinsi (Kadipaten - Jatibarang)	Kab. Indramayu											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	56.352	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-60-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU
23.	Pelebaran Ruas Jalan Cipasung – Subang – Cilebak (Kab. Kuningan) – Kutaagung/Dayeuh Luhur (Kab. Cilacap)	Kab. Kuningan											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	80.000	v	v	
24.	Pelebaran Jalan Pangkalan Damri – Kiarapayung (Exit Ramp Cisumdawu – Jatinangor)	Kab. Sumedang											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	22.500	v	v	

Ket:

■ Tahap
Persiapan

■ Tahap
Konstruksi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-61-

Tabel IV.2 Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan Kawasan Rebana

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20..).										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU
A.	Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat												105.330.000				
1.	Reaktivasi Rel KA Rancaekek – Tanjungsari	Kab. Bandung, Kab. Sumedang											Kementerian Perhubungan	1.200.000	v		
2.	Pembangunan Kereta Cepat Bandung – Kertajati	Kab. Sumedang, Kab. Majalengka											Kementerian Perhubungan	20.000.000			v
3.	Pembangunan Rel KA Subang – Patimban	Kab. Subang											Kementerian Perhubungan	4.000.000	v		v
4.	Pembangunan Rel KA Semi Cepat Jakarta – Surabaya	Kab. Indramayu											Kementerian Perhubungan	80.000.000	v		v
5.	Pembangunan Terminal Tipe B Ciledug	Kab. Cirebon											Pemerintah Daerah	65.000		v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-62-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20..)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/KPBU
6.	Pembangunan Terminal Tipe B Indramayu	Kab. Indramayu											Pemerintah Daerah	65.000		v	

Ket:

 Tahap Persiapan  Tahap Konstruksi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-63-

Tabel IV.3 Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar Kawasan Rebana

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/BUMD/SWASTA/KPBU	
A.	Sarana dan Prasarana Persampahan													577.978				
1.	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Jalupang	Kec. Kalijati, Kab. Subang												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	31.000	v	v	
2.	Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Cirebon Raya	Kec. Ciwaringin, Kab. Cirebon												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	500.000	v	v	v
3.	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Heuleut	Kec. Kadipaten, Kab. Majalengka												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	25.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-64-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/BUMD / SWASTA/KPBU	
4.	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang	Manyingsal, Kec. Cipunagara, Kab. Subang												a. Kementerian PUPR; b. BUMN (Lahan)	21.978	v		v
B.	Sarana dan Prasarana Air Limbah												614.000					
5.	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terintegrasi Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang	Manyingsal, Kec. Cipunagara, Kab. Subang												a. Kementerian PUPR; b. BUMN (Lahan)	614.000	v		v



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-65-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/BUMD/ SWASTA/KPBU	
C.	Sarana dan Prasarana Permukiman													6.319.763				
6.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang	Manyingsal, Kec. Cipunagara, Kab. Subang												a. Kementerian PUPR; b. BUMN (Lahan)	370.000	v		v
7.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap I	Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan, Dokumen Perencanaan dan Sebagian Konstruksi)	2.100.000	v	v	v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-66-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/BUMD/ SWASTA/KPBU	
8.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap II	Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	3.100.000	v	v	v
9.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Skala Kota Daerah Pelayanan Kuningan – Cirebon – Brebes	Kab. Kuningan												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	235.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-67-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/BUMD/ SWASTA/KPBU	
10.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Kuningan (Sumber Mata Air Darmaloka, Cigugur, Cibulan)	Kab. Kuningan												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	54.763	v	v	
11.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Cipanas	Kab. Sumedang												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	200.000	v	v	
12.	Pembangunan Rumah Susun Pekerja Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang	Manyingsal, Kec. Cipunagara, Kab. Subang												a. Kementerian PUPR; b. BUMN (Lahan)	130.000	v		v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-68-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/BUMD/ SWASTA/KPBU
13.	Pembangunan Rumah Susun Pekerja Subang Smartpolitan	Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang											a. Kemeterian PUPR; b. Swasta (Lahan)	130.000	v		v

Ket:

 Tahap Persiapan  Tahap Konstruksi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-69-

**Tabel IV.4 Rencana Induk Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur
Sumber Daya Air Kawasan Rebana**

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPB
A.	Pembangunan Waduk/Bendungan												6.420.000				
1.	Pembangunan Waduk/Bendungan Kadumalik	Kab. Majalengka, Kab. Sumedang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Kementerian PUPR	1.300.000	v		
2.	Pembangunan Waduk/Bendungan Cipunagara Kab. Subang	Kab. Subang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Kementerian PUPR	3.700.000	v		
3.	Pembangunan Waduk/Bendungan Gunungkarung	Kec. Luragung, Kab. Kuningan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Kementerian PUPR	1.000.000	v		
4.	Rehabilitasi Waduk/Bendungan Darma	Kec. Darma, Kab. Kuningan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan)	120.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-70-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU
5.	Pembangunan Waduk Cipanundan	Kec. Waled, Kab. Cirebon											Kementerian PUPR	300.000	v		
B.	Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir												1.331.555				
6.	Pengendalian Banjir Kawasan BIJB (Normalisasi Sungai Cibolerang, Revitalisasi Situ Cijawura dan Cimaneuh)	Kec. Kertajati, Kab. Majalengka											Kementerian PUPR	150.000	v		
7.	Pembangunan Embung Rancah Hilir	Kec. Pamanukan, Kab. Subang											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	20.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-71-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU	
8.	Pengendalian Banjir Sungai DAS Cisanggarung, Citaal, Cijangkelok, Cibat, Cipanundan	Kab. Kuningan, Kab. Cirebon												Kementerian PUPR	128.000	v		
9.	Pembangunan Embung Winduhaji, Waled Asem, Suranenggala, Bungko Lor, Cikeusal	Kec. Sedong, Kec. Waled, Kec. Gempol, Kec. Suranenggala, Kec. Kapetakan Kab. Cirebon												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	100.000	v	v	
10.	Pengendalian Banjir Kab. Subang	Kec. Pamanukan, Kab. Subang												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	778.255	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-72-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU
11.	Program Pengembangan Desa Konservasi	100 Desa di Kab. Subang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan											a. Kementerian KLHK b. Pemerintah Daerah (Pemberdayaan masyarakat) c. BUMN/BUMD/Swasta	155.300	v	v	v
C.	Infrastruktur Irigasi													474.000			
12.	Rehabilitasi tuntas daerah irigasi (DI Cikeusik dan DI Seuseupan)	DI Cikeusik (Kab. Kuningan), DI Seuseupan (Kab.Cirebon)											Kementerian PUPR	84.000	v		
13.	Pembangunan Daerah Irigasi Cileuweung	Kec. Cibingbin dan Kec. Cibeureum Kab. Kuningan											Kementerian PUPR	140.000	v		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-73-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU	
14.	Pembangunan Daerah Irigasi Jangkelok	Kec. Cibingbin dan Kec. Cibeureum Kab. Kuningan												Kementerian PUPR	250.000	v		

Ket:

■ Tahap
Persiapan

■ Tahap
Konstruksi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-74-

Tabel IV.5 Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Lainnya Kawasan Rebana

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA /KPB	
A. Sumber Daya Manusia														2.805.250				
1.	Pembangunan Pusat Pendidikan Vokasi/ Pelatihan Vokasi	Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang												a. Kementerian Perindustrian; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Bangunan)	105.000	v	v	
2.	Pembangunan Akademi Maritim	Kec. Pusakanagara, Kab. Subang												a. Kementerian Perhubungan; b. Kementerian Dikbud-Ristek; c. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	500.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-75-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA /KPB	
3.	Pembangunan Politeknik Manufaktur Kampus II	Kec. Panyingkiran, Kab. Majalengka												a. Kementerian PUPR; b. Kementerian Dikbud-Ristek; c. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	500.000	v	v	v
4.	Pengembangan Institut Teknologi Bandung Kampus Cirebon	Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon												a. Kementerian Dikbud-Ristek; b. Kementerian PUPR; c. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan); d. ITB	1.700.250	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-76-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA /KPB	
B.	Daya Saing Kawasan														577.560			
5.	Pembangunan Gedung <i>Creative Centre</i>	Kab Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan												a. Kementerian Parekraf (Sarana dan Prasarana); b. Pemerintah Daerah (Lahan, Dokumen Perencanaan, dan Bangunan)	63.000	v	v	
6.	Pembangunan Gedung Pusat Budaya	Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang												Pemerintah Daerah	25.000		v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-77-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA /KPBU	
7.	Penataan Kawasan Waduk Jatigede sebagai Destinasi Wisata	Kab. Sumedang												a. Kementerian Parekraf; b. Pemerintah Daerah (Lahan, dokumen perencanaan)	200.000	v		v
8.	Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Subang, Kab. Indramayu	Kec. Losari, Gebang, Pangenan, Astanajapura, dan Mundu, Kec. Lemahwungkuk, Kec. Pusakanagara												a. Kementerian KP; b. Pemerintah Daerah	100.000	v	v	
9.	Pengembangan Kawasan Agribisnis Berbasis Korporasi Petani	Kab. Sumedang, Kab. Kuningan												a. Kementerian Pertanian; b. Pemerintah daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	89.560	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-78-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA /KPB	
10.	Pengembangan desa digital	Kab. Majalengka, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Sumedang												a. Kementerian Kominfo; b. Kementerian Desa dan PDTT; c. Pemerintah Daerah (Dokumen Perencanaan)	100.000	v	v	
C. Sarana dan Prasarana Kesehatan												1.053.400						
11.	Pengembangan Rumah Sakit Cideres Tipe B	Kab. Majalengka												a. Kementerian Kesehatan; b. Pemerintah daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan); c. Swasta	350.000	v	v	v
12.	Pembangunan Rumah Sakit Cipeundeuy Tipe A	Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang												a. Kementerian Kesehatan; b. Swasta (Lahan)	500.000			v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-79-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA /KPB	
13.	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pantura	Kec. Pusakanegara Kab. Subang												a. Kementerian Kesehatan; b. Pemerintah daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	203.400	v	v	v
D.	Infrastruktur Energi												9.018.370					
14.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Tampomas	Kab. Sumedang												Kementerian ESDM	3.220.000	v		v
15.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sangkahurip Ciremai	Kab. Kuningan, Kab. Majalengka												Kementerian ESDM	3.930.000	v		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-80-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA /KPB
16.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede	Kab. Sumedang											Kementerian ESDM	668.370	v		
17.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Wado	Kab. Sumedang											Kementerian ESDM	1.200.000			v
F.	Pengembangan Kawasan Industri													76.740.000			
18.	Pengembangan Kawasan Industri Subang Smartpolitan	Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang											Swasta	4.845.000			v
19.	Pengembangan Kawasan Industri Taifa	Kec. Pagaden, Kab. Subang											Swasta	285.000			v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-81-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA /KPBU	
20.	Pengembangan Kawasan Industri Rebana Teknopolis	Kec. Cibogo, Kec. Cipeundeuy, Kec. Kalijati (Kab. Subang)												Swasta, BUMN	4.275.000			v
21.	Pengembangan Kawasan Industri Grand Rebana	Manyingsal, Kec. Cipunagara, Kab. Subang												Swasta, BUMN	4.275.000			v
22.	Pengembangan Kawasan Industri Petrokimia Balongan	Kec. Balongan, Kab. Indramayu												Swasta	2.850.000			v
23.	Pengembangan Kawasan Industri Sultan Werdinata	Kec. Losarang, Kab. Indramayu												Swasta	57.930.000			v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-82-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA /KPB	
24.	Pengembangan Kawasan Industri Kertajati	Kec. Kertajati, Kab. Majalengka												Swasta	2.280.000			v

Ket:

 Tahap
Persiapan

 Tahap
Konstruksi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-83-

IV.2 RENCANA INDUK KAWASAN JAWA BARAT BAGIAN SELATAN

Rencana Induk pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan memuat rencana proyek dan program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021-2030. Penyusunan proyek dan program dalam Rencana Induk disertai dengan judul, lokasi, tahun pelaksanaan, penanggung jawab, indikasi anggaran, serta sumber dana. Rencana proyek dan program mengarah pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan terdiri dari:

1. Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur;
2. Rencana Induk Pengembangan Sektor Agribisnis;
3. Rencana Induk Pengembangan Sektor Kelautan; dan
4. Rencana Induk Pengembangan Sektor Pariwisata.

A. Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur

Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari Rencana Induk ini, yaitu:

1. Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Jalan;
2. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan;
3. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar;
4. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
5. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lainnya.

Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.6.

B. Rencana Induk Pengembangan Sektor Agribisnis

Rencana Induk pengembangan sektor agribisnis yang terintegrasi berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari Rencana Induk ini yaitu:

1. Pembangunan Pasar;
2. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Sektor Agribisnis; dan
3. Pembangunan Sarana Pengembangan Sektor Peternakan.

Rencana Induk Pengembangan Agribisnis untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.7.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-84-

C. Rencana Induk Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan

Rencana Induk Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari Rencana Induk ini, yaitu:

1. Pembangunan dan Penataan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
2. Pembangunan Galangan Kapal Perikanan;
3. Pengembangan Kawasan Tambak dan Budi Daya; dan
4. Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan.

Rencana Induk Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.8.

D. Rencana Induk Pengembangan Sektor Pariwisata

Rencana Induk Pengembangan Sektor Pariwisata berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari Rencana Induk ini, yaitu:

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata;
2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Berbasis Pariwisata;
3. Pengembangan Desa Wisata; dan
4. Pembangunan *Creative Center*.

Rencana Induk Pengembangan Sektor Pariwisata untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.9.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-85-

Tabel IV.6 Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
I.	Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Jalan												57.188.078				
A.	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan												51.840.000				
1.	Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Segmen 1 (Gedebage-Tasikmalaya)	Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya											Kementerian PUPR	30.240.000			v
2.	Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Segmen 2 (Tasikmalaya-Cilacap)	Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, Kab. Cilacap											Kementerian PUPR				v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-86-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
3.	Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi-Ciranjang-Padalarang Segmen 1 (Ciawi-Sukabumi)	Kab. Bogor, Kab. Sukabumi											Kementerian PUPR				v
4.	Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi-Ciranjang-Padalarang Segmen 2 (Sukabumi-Padalarang)	Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat											Kementerian PUPR	21.600.000			v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-87-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
B.	Peningkatan dan Pengembangan Jalan												5.348.078				
5.	Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Barat)	Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	931.000	v	v	
6.	Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Timur)	Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	1.740.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-88-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU	
7.	Pelebaran Jalur Vertikal Cibadak-Cikidang-Palabuhanratu	Kab. Sukabumi												a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	280.000	v	v	
8.	Pelebaran Jalan Lingkar Tengah Pangandaran	Kec. Kalipucang, Kec. Pangandaran, Kec. Sidamulih, Kec. Parigi, Kec. Langkaplancar												a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	240.000	v	v	
9.	Pelebaran Jalan Lingkar Utara Ciamis-Banjar	Kab. Ciamis												a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	150.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-89-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU	
10.	Pembangunan Ruas Jalan Alternatif Palabuhanratu-Cisolok	Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi												a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	271.000	v	v	
11.	Pembangunan Jalan Lingkar Garut	Kec. Kadungora, Kec. Leles, Kec. Leuwigoong, Kec. Banyuresmi, Kec. Garut Kota, Kec. Tarogong Kidul, Kec. Tarogong Kaler, Kec. Cilawu Kab. Garut												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	800.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-90-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU	
12.	Rekonstruksi Jalur Vertikal Bandung-Pangalengan-Rancabuaya	Kab. Bandung, Kab. Garut												a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	336.000	v	v	
13.	Pembangunan Jalur Vertikal Ciwidey-Cikadu-Sindangbarang	Kab. Bandung, Kab. Cianjur												a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	108.750	v	v	
14.	Pelebaran Jalan Akses Pelabuhan Pangandaran	Kec. Parigi Kab. Pangandaran												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	85.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-91-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
15.	Pelebaran Jalan Cianjur-Sindangbarang	Kab. Cianjur											a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	88.328	v	v	
16.	Pembangunan Jembatan Benteng-Manonjaya	Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	318.000	v	v	
II.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan												9.160.000				
A.	Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat												7.570.000				
17.	Peningkatan Jaringan Rel KA Cipatat-Padalarang	Kab. Bandung Barat											Kementerian Perhubungan	3.000.000	v		v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-92-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
18.	Reaktivasi Jaringan Rel KA Cibatu-Cikajang	Kab. Garut											a. Kementerian Perhubungan (Konstruksi); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan) c. BUMN (Lahan dan Pengelolaan)	1.390.000	v	v	v
19.	Reaktivasi Rel KA Banjar-Cijulang	Kab. Pangandaran											a. Kementerian Perhubungan (Konstruksi); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan); c. BUMN (Lahan dan Pengelolaan)	3.000.000	v	v	v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-93-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
20.	Pembangunan Terminal Tipe A Pangandaran	Kab. Pangandaran		■	■	■							a. Kementerian Perhubungan (Konstruksi); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	75.000	v	v	
21.	Pembangunan Terminal Tipe B Singaparna	Kab. Tasikmalaya				■	■	■	■				Pemerintah Daerah	30.000		v	
22.	Pembangunan Terminal Tipe B Palabuhanratu	Kab. Sukabumi			■	■	■						Pemerintah Daerah	75.000		v	
B.	Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut												240.000				
23.	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Majingklak	Kab. Pangandaran		■	■	■							a. Kementerian Perhubungan (Konstruksi); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	35.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-94-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU	
24.	Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Palabuhanratu	Kab. Sukabumi												Kementerian Perhubungan	139.000	v		
25.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Palangpang	Kab. Sukabumi												a. Kementerian Perhubungan (Konstruksi); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	66.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-95-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU	
C.	Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara												1.350.000					
26.	Pengembangan Bandar Udara Nusawiru	Kec. Cijulang, Kab. Pangandaran												a. Kementerian Perhubungan (Konstruksi); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	500.000	v	v	v
27.	Pembangunan Bandar Udara Cikembar	Kec Cikembar, Kab. Sukabumi												a. Kementerian Perhubungan (Konstruksi); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	850.000	v	v	v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-96-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
III.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar												551.560				
28.	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Ciminyak	Kec. Cisaga, Kab. Ciamis											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	30.000	v	v	
29.	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Nangkaleah	Kec. Mangunreja, Kab. Tasikmalaya											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	33.560	v	v	
30.	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Bojongsari	Kec. Padaherang, Kab. Pangandaran											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	30.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-97-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
31.	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Garut	Kec. Pameungpeuk, Kec. Caringin, Kec. Banjarwangi, Kab. Garut											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	75.000	v	v	
32.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Palabuhanratu	Kab. Sukabumi											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	106.000	v	v	
33.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Pangandaran	Kab. Pangandaran											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	50.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-98-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
34.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Purbahayu	Kab. Pangandaran											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	30.000	v	v	
35.	Penataan Kawasan Kumuh	Kab. Pangandaran											a. Kementerian PUPR b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	30.000	v	v	
36.	Pembangunan Kawasan Pesisir Minapolitan Jawa Barat Selatan	Kab. Garut, Kab. Cianjur											a. Kementerian PUPR b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	30.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-99-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
37.	Pembangunan Rumah Khusus Nelayan	Kab. Garut											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	137.000	v	v	
IV.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air												6.414.000				
A.	Pembangunan Bendungan/Waduk												4.000.000				
38.	Pembangunan Bendungan/Waduk																
	a. Bendungan Citepus	Kab. Sukabumi											a. Kementerian PUPR (Konstruksi, Dokumen Perencanaan, Lahan); b. Pemerintah Daerah (Lahan)	1.000.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-100-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
	b. Bendungan Matenggeng	Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Cilacap											Kementerian PUPR (Konstruksi, Dokumen Perencanaan, Lahan)	3.000.000	v		
B.	Pengendalian Banjir													700.000			
39.	Penanganan Banjir di Kabupaten Sukabumi	Sungai Cibalabuan dan Ciranca (Kec. Palabuhanratu), Sungai Cisolok (Kec. Cisolok)											Kementerian PUPR	55.000	v		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-101-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU	
40.	Penanganan Banjir di Kabupaten Pangandaran	Sungai Cijulang-Cijalu (Kec. Parigi), Sungai Cikembulan (Kec. Sidamulih), Banjir Padaherang (Kec. Padaherang)												Kementerian PUPR	475.000	v		
41.	Penanganan Banjir di Kabupaten Tasikmalaya	Banjir Sukaresik, Sungai Cilangla (Kec. Karangnunggal, Kec. Bantarkalong, Kec. Bojongasih)												Kementerian PUPR	135.000	v		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-102-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
42.	Penanganan Banjir di Kabupaten Garut	Sungai Cipalebuh dan Sungai Cikaso (Kec. Pameungpeuk, Kec. Cibalong)											Kementerian PUPR	35.000	v		
C.	Pembangunan Breakwater												360.000				
43.	Pembangunan <i>Breakwater</i> Pantai Timur Pangandaran	Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Dokumen Perencanaan)	180.000	v	v	
44.	Pembangunan <i>Breakwater</i> Pantai Rancabuaya	Kec. Caringin, Kab. Garut											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Dokumen Perencanaan)	180.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-103-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
D.	Pembangunan Embung													280.000			
45.	Pembangunan Embung Air Baku di Kabupaten Sukabumi	Kec. Sagaranten, Kec. Purabaya (Kab. Sukabumi)											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan, Dokumen Perencanaan)	60.000	v	v	
46.	Pembangunan Embung Pengendali Banjir dan Air Baku di Kabupaten Ciamis	Kec. Banjarsari, Kec. Panjalu, Kec. Lakbok, Kec. Purwadadi (Kab. Ciamis)											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan, Dokumen Perencanaan)	160.000	v	v	
47.	Pembangunan Embung Air Baku Irigasi Sawah di Kabupaten Tasikmalaya	Kec. Cigalontang, Kec. Pancatengah (Kab. Tasikmalaya)											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan)	60.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-104-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
E.	Pembangunan Infrastruktur Irigasi												1.074.000				
48.	Pembangunan Daerah Irigasi Baru												799.000				
	a. DI Caringin	Kab. Sukabumi											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Dokumen Perencanaan, Lahan)	250.000	v	v	
	b. DI Curug Dengdeng	Kab. Cianjur											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan, Dokumen Perencanaan)	105.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-105-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU	
	c. DI Parigi	Kab. Pangandaran												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan, Dokumen Perencanaan)	176.000	v	v	
	d. DI Candra Goyang	Kab. Garut												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Dokumen Perencanaan, Lahan)	115.000	v	v	
	e. DI Cikalong	Kab. Tasikmalaya												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Dokumen Perencanaan, Lahan)	153.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-106-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU	
49.	Optimalisasi Daerah Irigasi													275.000				
	a. Rehab Tuntas DI Padawaras	Kab. Tasikmalaya												Kementerian PUPR	25.000	v		
	b. Pembangunan Bendung Cijalu	Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya												Kementerian PUPR	75.000	v		
	c. Rehab Tuntas DI Cidadali	Kec. Kadupandak, Kab. Cianjur												Kementerian PUPR	125.000	v		
	d. Pencetakan Sawah Baru	Kec. Cipatujah, Kec. Karangnunggal, Kec. Bantarkalong (Kab. Tasikmalaya)												a. Kementerian Pertanian (Lahan); b. Pemerintah Daerah (Lahan, Dokumen Perencanaan)	50.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-107-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU	
V.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lainnya												62.068.300					
50.	Pengembangan Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum (RSU) Jampang Kulon	Desa Tanjung, Kec. Jampang Kulon, Kab. Sukabumi												a. Kementerian Kesehatan (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	319.000	v	v	
51.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Cisolok-Cisukarame	Cisolok-Sukarame, Kab. Sukabumi												Kementerian ESDM	1.428.500	v		v
52.	Pengembangan <i>Pump Storage Upper</i> Cisokan	Kab. Bandung Barat, Kab. Cianjur												Kementerian ESDM	11.428.000	v		v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-108-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
53.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata	Kab. Purwakarta, Kab. Bandung Barat, Kab. Cianjur											Kementerian ESDM	2.000.000			v
54.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Matenggeng <i>Pumped Storage</i>	Kab. Kuningan, Kab. Ciamis											Kementerian ESDM	12.000.000			v



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-109-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
55.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kab. Sukabumi	Kab. Sukabumi											Kementerian ESDM	24.078.800			v
56.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kab. Garut	Kab. Garut											Kementerian ESDM				v
57.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Galunggung	Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Garut											Kementerian ESDM	7.857.000	v		v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-110-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA / KPBU
58.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Papandayan	Kab. Garut											Kementerian ESDM	2.857.000	v		v
59.	Pembangunan Desa Digital	120 Desa di Kab. Garut, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Pangandaran											a. Kementerian Desa dan PDTT; b. Kementerian Kominfo; c. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	100.000	v	v	

Ket:



Tahap
Persiapan



Tahap
Konstruksi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-111-

Tabel IV.7 Rencana Induk Pengembangan Sektor Agribisnis Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/BUMD/SWASTA/KPBU	
I.	Pembangunan Pasar													200.000				
1.	Pembangunan Pasar Cikajang	Kec. Cikajang, Kab. Garut												a. Kementerian PUPR; b. Kementerian Perdagangan; c. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	80.000	v	v	
2.	Pembangunan Pasar Padakembang	Kec. Padakembang, Kab. Tasikmalaya												a. Kementerian PUPR; b. Kementerian Perdagangan; c. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	120.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-112-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/BUMD/ SWASTA/KPBU
II.	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Sektor Agribisnis												80.000				
3.	Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP)	Kab. Tasikmalaya											a. Kementerian Perdagangan; b. Pemerintah Daerah	30.000	v	v	
4.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Produk Turunan Kelapa (Produk Unggulan Kawasan Desa Kementerian Desa dan PDTT)	Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya											a. Kementerian Pertanian; b. Pemerintah Daerah	50.000	v	v	
III.	Pembangunan Sarana Pengembangan Sektor Peternakan												50.000				
5.	Pembangunan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sapi Pasundan	Desa Sidaharja, Kec. Laktok, Kab. Ciamis											a. Kementerian Pertanian; b. Pemerintah Daerah	50.000	v	v	

Ket:

Tahap Persiapan

Tahap Konstruksi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-113-

**Tabel IV.8 Rencana Induk Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan
Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan**

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/BUMD/ SWASTA/KPBU	
I.	Pembangunan dan Penataan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan												1.882.000					
1.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Palabuhanratu	Kab. Sukabumi												a. Kementerian KP; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Perizinan)	612.000	v	v	
2.	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Cilauteureun	Kec. Cikelet, Kab. Garut												a. Kementerian KP; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	170.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-114-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/BUMD/SWASTA/KPBU	
3.	Penataan Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Ujunggenteng, Minajaya, Loji, Cikembang, Cisolok, Ciwaru, Cibangban, Tegalbuleud (Kab. Sukabumi)												a. Kementerian KP; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	490.000	v	v	
4.	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Rancabuaya (Kab. Garut); Batukaras (Kab. Pangandaran); Jayanti (Kab. Cianjur); Minajaya, Cisolok, Ciwaru (Kab. Sukabumi); Nusamanuk, Pamayangsari (Kab. Tasikmalaya)												a. Kementerian KP; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	610.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-115-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/BUMD/SWASTA/KPBU	
II. Pembangunan Galangan Kapal Perikanan														30.000				
5.	Pembangunan Galangan Kapal Perikanan	Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi												a. Kementerian KP; b. Kementerian Perindustrian c. Swasta	30.000			v
III. Pengembangan Kawasan Tambak dan Budi Daya														904.000				
6.	Pengembangan Kawasan Tambak Udang	Kab. Pangandaran, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi												a. Kementerian KP; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	800.000	v	v	
7.	Pengembangan Budi Daya Lobster dan Sidat	Kab. Sukabumi												a. Kementerian KP; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	104.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-116-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/BUMD/SWASTA/KPBU
IV	Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan												300.000				
8.	Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	Kab. Pangandaran, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi											a. Kementerian KP; b. Pemerintah Daerah	300.000	v	v	

Ket:

 Tahap
Persiapan

 Tahap
Konstruksi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-117-

Tabel IV.9 Rencana Induk Pengembangan Sektor Pariwisata Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU	
I.	Pengembangan Destinasi Pariwisata													671.000				
1.	Pengembangan Kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark – Kabupaten Sukabumi	Kawasan Ujunggenteng (Kec. Ciracap); Kawasan Geyser Cisolok (Kec. Cisolok); Pantai Minajaya (Kec. Surade); Pantai Cikembang (Kec. Cisolok); Pantai Cibangban (Kec. Palabuhanratu); Pantai Karanghawu (Kec. Cisolok); Kawasan Kasepuhan Ciptagelar (Kec. Cisolok dan Kec. Cikakak); Curug Cikaso (Kec. Surade)												a. Kementerian Parekraf; b. Kementerian PUPR; c. Pemerintah Daerah (Lahan, Penataan Kawasan <i>(sharing</i> konstruksi), pemberdayaan masyarakat dan Dokumen Perencanaan)	167.500	v	v	v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-118-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU	
2.	Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Cianjur	Kawasan Gunung Padang (Kec. Cempaka); Pantai Cemara Cipanglay (Kec. Cidaun); Pantai Tipar Sinar Laut (Kec. Argabinta); Pantai Batukukumbung (Kec. Cidaun); Kawasan Wisata Budaya Pandanwangi (Kec. Warungkondang)												a. Kementerian Parekraf; b. Kementerian PUPR; c. Pemerintah Daerah (Lahan, Penataan Kawasan <i>(sharing</i> konstruksi), pemberdayaan masyarakat dan Dokumen Perencanaan)	92.500	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-119-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU	
3.	Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Garut	Pantai Santolo, Pantai Sayangheulang (Kec. Cikelet); Kawasan Situ Bagendit (Kec. Banyuresmi); Situ Cangkuang												a. Kementerian Parekraf; b. Kementerian PUPR; c. Pemerintah Daerah (Lahan, Penataan Kawasan (<i>sharing</i> konstruksi), pemberdayaan masyarakat dan Dokumen Perencanaan)	135.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-120-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU
4.	Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Tasikmalaya	Pantai Karangtawulan (Kec. Cikalong); Geopark Galunggung (Kab. Tasikmalaya)											a. Kementerian Parekraf; b. Kementerian PUPR; c. Pemerintah Daerah (Lahan, Penataan Kawasan <i>(sharing</i> konstruksi), pemberdayaan masyarakat dan Dokumen Perencanaan)	103.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-121-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU	
5.	Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Ciamis	Situ Lengkong (Kec. Panjalu); Karangkamulyan (Kec. Cijeungjing); Kampung Adat Kuta (Kec. Tambaksari)												a. Kementerian Parekraf; b. Kementerian PUPR; c. Pemerintah Daerah (Lahan, Penataan Kawasan <i>(sharing</i> konstruksi), pemberdayaan masyarakat dan Dokumen Perencanaan)	70.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-122-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU	
6.	Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Pangandaran	Kawasan Wisata Budaya Cikalong (Kec. Sidamulih), Pantai Madasari (Kec. Cimerak), Geopark Pangandaran												a. Kementerian Parekraf; b. Kementerian PUPR; c. Pemerintah Daerah (Lahan, Penataan Kawasan (<i>sharing</i> konstruksi), pemberdayaan masyarakat dan Dokumen Perencanaan)	103.000	v	v	
II.	Pengembangan Kawasan Ekonomi Berbasis Pariwisata												18.000.000					
7.	Pengembangan Kawasan Pariwisata Cikidang	Kab. Sukabumi												Badan Usaha	18.000.000			v



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-123-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU	
III.	Pengembangan Desa Wisata													250.000				
8.	Pengembangan Desa Wisata	Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran												a. Kementerian Parekraf; b. Pemerintah Daerah (Lahan, Penataan Kawasan (<i>sharing</i> konstruksi), pemberdayaan masyarakat dan Dokumen Perencanaan)	250.000	v	v	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-124-

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20...)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU	
9.	Pembangunan <i>Creative Center</i>	Kab. Sukabumi, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran												Pemerintah Daerah	105.000		v	

Ket:

 Tahap
Persiapan

 Tahap
Konstruksi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,




Satya Bhakti Parikesit